

**PERANG ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) KOTA MAKASSAR
DALAM MENAWAL KASUS KEKERASAN
TERHADAP JURNALIS MAKASSAR**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Ilmu Komunikasi Jurusan Jurnalistik
Pada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
UIN Alauddin Makassar

Oleh

JUNAIDDIN
NIM 50500111026

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Junaiddin

NIM : 50500111026

Tempat/Tgl.Lahir : Parado Rato 16 Juni 1992

Jurusan : Jurnalistik

Fakultas/Program : Dakwah dan Komunikasi/S1

Alamat : Jl Tala'salappang no, 11

Judul : Peran Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Makassar,
dalam mengawal kasus kekerasan terhadap jurnalis
Makassar.

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulisan sendiri. Jika dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar 19 November 2016

Penulis.

Junaiddin

NIM.50500111026

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul, "peran Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Makassar dalam mengawal kasus kekerasan terhadap Jurnalis Makassar", yang disusun oleh Junaiddin, NIM. 50500111026, mahasiswa Jurusan Jurnalistik, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan padahari Kamis Tanggal 24 Oktober Tahun 2016, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Jurnalistik.

Gowa, 19 Juni 2016

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Drs. Alamsyah, M.Hum	()
Sekretaris	: Syamsidar, S.AgM.Ag	()
Munaqisy I	: Ramsiah Tasruddin, S.Ag., M.Si	()
Munaqisy II	: A. Fadli, S.Sos., M.Pd	()
Pembimbing I	: Dr. Firdaus Muhammad, M.Ag	()
Pembimbing II	: A. Fauziah Astrid Abidin, S.Sos., M.Si	()

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Alauddin Makassar,


Dr. H. Abd. Rasvid Masri, S.Ag., M.Pd., M.Si., M.M

NIP. 19690827 199603 1 004

ABSTRAK

Nama :Junaidin

NIM :50500111026

Judul :Peran Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Makassar Dalam Mengawal Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis Makassar

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana peran Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Makassar dalam mengawal kasus kekerasan terhadap jurnalis Makassar? Pokok masalah tersebut di- *breakdown* kedalam beberapa submasalahatau kedalam pertanyaan penelitian yaitu: 1) Bagaimana fenomena kekerasan jurnalis makassar? 2) Bagaimana AJI makassar dalam mengawal dan menyelesaikan kasus kekerasan jurnalis makassar.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang fokus pada peran Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap wartawan di kota Makassar dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan komunikasi, adapun metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi literature, dan dokumen serta temuan data-data yang relevan lainnya yang berkaitan dengan penelitian, selama proses penelitian dilakukan.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini adalah, AJI Makassar melatih, menempa dan membentuk karakter-karakter jurnalis agar bisa menjadi wartawan yang profesional dan independen. Dengan selalu menghadirkan kajian-kajian yang bersifat membangun dan memperluas wawasan tentang ilmu-ilmu kejournalitikan, atau berdiskusi yang mengkaji tentang pengalaman dan realitas yang terjadi di dunia kejournalistikan. Sehingga AJI selalu *update* isu-isu yang berkembang. AJI dalam melihat kekerasan yang terjadi tidak subjektif tapi melihat dengan objektif, sebelum mengawal/ mendampingi kasus kekerasan yang dialami oleh jurnalis, AJI selalu mengedepankan aturan-aturan/ hukum yang berlaku, atau kode etik dan kode perilaku jurnalistik, untuk kemudian sebagai alat untuk melihat realitas kebenaran yang terjadi di lapangan, yang tentu untuk mempertahankan eksistensi dalam perjuangan.

Implikasi penelitian adalah agar AJI tetap mampu mengawal semua kekerasan yang dialami oleh jurnalis, khususnya jurnalis yang ada di sekitar Makassar.

KATA PENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah swt atas rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dicurahkan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. Salam dan shalawat senantiasa penulis haturkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu' Alaihi Wasallam sebagai satu-satunya *uswa* dan *qudwah*, petunjuk jalan kebenaran dalam menjalankan aktivitas keseharian.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tuaku yang tercinta ayahanda Abubakar **Bin Ismail** dan ibunda asiyah **Binti Ahmad**, atas kasih sayangnya, bimbingan, nasehat, pengorbanan dan doa yang tiada henti, semuanya tidak akan bisa tergantikan dengan apapun di dunia ini, semoga Allah senantiasa menjaga, menyayangi, umur panjang dan memberi petunjukNya, Amin...

Penulis juga menyadari tanpa adanya bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan seperti yang diharapkan. Karena itu penulis patut menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Alauddin Makassar Prof.Dr. H. Musafir Pababari M. Si dan para Wakil Rektor UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya.
2. Dr. H. Abd. Rasyid Masri, S.Ag., M.Pd., M.Si., MM selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar serta para Wakil Dekan serta para stafnya.
3. Drs. Alamsyah, M. Hum dan Syamsidar S.Ag., M.Ag masing-masing Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Jurnalistik
4. Dr. Firdaus Muhammad, M.Ag dan Andi Fauziah Astrid S.Sos., M.Si selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang dengan ikhlas banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis hingga terwujudnya skripsi ini.

5. Ramsiaah Tasruddin, S.Ag.,M.Si dan Andi Muh. Fadli, S.Sos.,M.Pd selaku penguji I dan penguji II yang telah mengoreksi dan memberikan masukan kepada penulis hingga skripsi ini selesai.
6. Semua keluarga besar penulis di kampung, yang selalu mengsupport penulis hingga sekarang, dan yang tak henti-hentinya mendoakan penulis.
7. Segenap dosen serta pegawai dalam lingkup Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan.
8. Keluarga kecil UKM LIMA, yang sudah memberikan kontribusi besar dalam menghiasi perjalanan penulis selama menjadi mahasiswa UIN, Alauddin Makassar
9. Seluruh keluarga besar Ikatan Mahasiswa parado Makassar, yang selalu memberi warna dari pertama hadir di Makassar hingga sekarang.
10. Teman-teman seperjuangan Jurnalistik angkatan 2011 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu
11. Keluarga besar himpunan mahasiswa jurusan jurnalistik (HMJ), UIN Alauddin Makassar
12. Keluarga besar himpunan mahasiswa bima dompu(HMBD), UIN Alauddin Makasar
13. Seluruh teman-teman KKN kebangsaan 2014 di seluruh Indonesia, terutama di desa semanget, Risky, Rido Ali, Sainy, Miftah Rahman, Titis Suriya Ningsi, sehelasalsabillah, Misna, Zulfa Rofikah, Daeng Maulana, Setia Nasition, Taufik, Retno,

14. Dan untuk semua pihak yang pernah memberikan nasehat, masukan kepada penulis sehingga skripsi ini mampu penulis selesaikan walaupun banyak tantangan yang penulis lewati

Akhirnya, harapan penulis semoga tulisan ini bermanfaat bagi pengajaran motivasi. Semoga bantuan, dorongan, dan motivasi yang telah diberikan bernilai ibadah di sisi Allah SWT dan mendapat pahala yang setimpal amin...

Samata-Gowa, 19 Juni 2016

Penyusun.

JUNAIDDIN
NIM. 50500111026



DAFTAR ISI

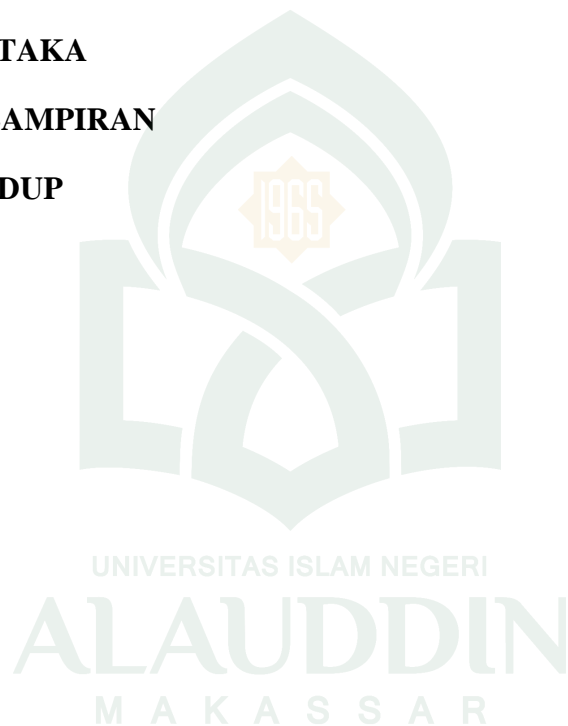
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	13
D. Kajian Pustaka/ Penelitian Relevan	14
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	
1. Tujuan Penelitian	16
2. Kegunaan Penelitian	16
BAB II TINJAUAN TEORITIS	18
A. Komunikasi	18
B. Media Massa	20
C. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)	24
D. Jurnalis	27
E. Independensi	28
F. Jurnalistik	31
G. Kekerasan	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Sumber Data	36
D. Metode Pengumpulan Data	37
E. Instrument Penelitian	39

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN	41
A. Gambaran Umum AJI (Aliansi Jurnalis Independen)	41
B. Fenomena kasus kekerasan jurnalis kota Makassar	46
C. AJI Makassar dalam Mengawal Kasus Kekerasan Jurnalis.....	53
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Implikasi Penelitian	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di jaman demokrasi sekarang ini yang katanyan semua orang berhak berkumpul, serikat, berpendat dimuka umum dan berhak mendapatkan informasi yang benar, Jurnalis sebagai insan Pers yang menghimpun mengedit dan menyebar luaskan informasi dan dilindungi oleh UU, seperti yang tercantum dalam UU Republik Indonesia, No 40 Tahun 1999 tentang Pers, poin A bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin oleh Negara.

Sampai saat ini Jurnalis masih saja mendapatkan perilaku kekerasan pada saat bertugas peliputan di lapangan. Orde Baru (Orba) yang memulai karir politiknya sejak pertengahan 1960-an menyusul jatuhnya Soekarno, menandai perkembangan baru dan berbeda dari pembentukan negara dalam masa Indonesia pasca kolonial. Secara ideologis Orba berbeda jauh dengan masa demokrasi terpimpin Soekarno yang bercirikan komitmen-komitmen sosialis dan populis. Meski gagasan seperti nasionalisme dan keadilan sosial tetap dipelihara namun gagasan itu cenderung dimaknai dengan cara yang relatif berbeda¹

¹AS Hikam, Muhammad, 1991, *Negara, Masyarakat Sipil dan Gerakan Politik di Indonesia*, Jakarta: Prisma, no.3 thn 2001, halaman 25.

Nasionalisme tidak lagi dipahami dalam konteks radikal anti kapitalisme, sebagaimana dimasa Soekarno berkuasa, tetapi lebih kurang sebagai suatu kesadaran atas kedaulatan nasional. Negara berhasil mengontrol masyarakat sipil melalui cara korporatif dan mendapatkan konsensus politik melalui hegemoni ideologi. Atas dasar itu, Orde Baru (Orba) berhasil melembagakan partisipasi masyarakat melalui organisasi korporasi ciptaannya, atau kebijakan Organ Tunggal. Hubungan pers dan pemerintah sempat berlangsung cukup baik, yaitu pada permulaan tahun 1967, pada saat pelimpahan kekuasaan Soekarno ke Soeharto pada sidang MPRS. Pada periode ini Orba cenderung bersikap menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang keras pada pers. Penguasa masih tetap memberi suasana kondusif bagi kebebasan pers. Sikap pemerintah ini membuat membuat industri pers lantas tumbuh subur. Penelitian Judith B Aggasi, menyebutkan antara 1967–1979 terdapat 132 terbitan di Indonesia, harian maupun tabloid, dengan total tiras hampir tiga juta eksemplar.²

Pemerintah mulai bersikap keras terhadap pemberitaan pers Indonesia, ketika sikap kritis pers terhadap pelbagai masalah, seperti kasus korupsi pejabat, efisiensi birokrasi dan pemborosan dana pembangunan. Pada Tanggal 2 Januari 1973, Panglima Kopkamtib, Jenderal Sumitro mencabut Surat Izin Terbit (SIT) sementara harian *Indonesia Raya* dan *Sinar Harapan*. Kopkamtib juga memberi teguran sangat keras terhadap harian *Pos Kota*, *Kami* dan *Merdeka*.³

²B Aggasi dalam Akhmad Zaini Akbar, 1995, *Kisah Pers Indonesia tahun 1966 – 1974*, Yogyakarta: LkiS, halaman 55.

³*Ibid.*, halaman 69

Puncaknya adalah peristiwa 15 Januari 1974 yang juga dikenal dengan sebutan Malari (Malapetaka Lima Belas Januari), saat mahasiswa berdemonstrasi memprotes kedatangan PM Jepang, Tanaka.

Pers Indonesia kemudian harus mengalami proses penyesuaian diri dan depolitisasi, dalam arti menghilangkan unsur-unsur politik dalam berita yang dimuat, kecuali yang mendukung pemerintah Orde Baru dan kebijakannya. Dapat dilihat bahwa depolitisasi tersebut merupakan akibat dari lepasnya pengaruh partai politik, maupun kekuasaan pemerintah.

Pemerintah memberikan sejumlah alasan untuk mengesankan bahwa tindakan pembredelan tersebut bukan dilakukan karena pemerintah yang anti kebebasan pers. Pemerintah menegaskan bahwa kehidupan pers Indonesia mempunyai ciri khas tersendiri. Kebebasan pers di Indonesia tidak bisa disamakan dengan kehidupan pers yang terjadi di negara-negara barat yang liberal. Sebagai pers yang hidup di negara Pancasila, maka pers Indonesia adalah pers Pancasila. Kebebasan pers dalam negara Pancasila tetap dijamin sepenuhnya, asal kebebasan itu kebebasan bertanggungjawab.⁴

Pemerintah Orba tahu bahwa pers adalah salah satu bagian kekuatan sosial, politik dan ekonomi yang berinteraksi dalam suatu orde politik tertentu. Dalam konteks hubungan negara dan masyarakat, pers selalu menempatkan dirinya

⁴Departemen Penerangan, 1983, *Pers Bebas Bertanggungjawab, Himpunan Pidato / ceramah Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika Departemen Penerangan – Sukirno*, Jakarta, halaman 52.

sebagai salah satu kekuatan sosial masyarakat yang berhadapan langsung dengan kekuatan politis negara dalam hal ini pemerintah.⁵

Dengan kata lain, menguasai pers berarti menguasai masyarakat beserta seluruh sendi kehidupan yang ada. Pemerintah kemudian menerbitkan Surat izin Usaha Pernerbitan Perusahaan Pers (SIUPP), sebagai pengontrol media, yang penerapannya terdapat dalam Undang Undang Pokok Pers no 21/ 1982. Jika SIUPP sebuah terbitan dicabut oleh Departemen Penerangan, maka terbitan itu dapat saja langsung ditutup oleh pemerintah. Keputusan ini semakin menegaskan dominasi yang kuat dari pemerintah terhadap pers. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai satu-satunya organisasi profesi wartawan di Indonesia saat itu, memilih diam. Sikap diam ini beralasan, karena PWI sejak tahun 1977 berhasil dibawa masuk ke Golkar/ dibawah kekuasaan pemerintah Orde Baru.⁶

Situasi ini membawa pers Indonesia menjadi mandul, berita-berita di media tidak lebih adalah jurnal tentang kegiatan pejabat, yang tanpa kritik. Pers menutup rapat-rapat informasi soal penyelewengan, ketimpangan, dan ketidakadilan sosial, masalah buruh, dan lainnya. Lewat pembungkaman terhadap pers, Orba menempatkan kedudukan masyarakat menjadi lemah. Pers yang merupakan salah satu unsur masyarakat menjadi lemah pula kedudukannya dan terpaksa harus

⁵Mc Quail, Dennis, 1989, *Teori Komunikasi Massa, Sebuah Pengantar*, Jakarta, Erlangga, halaman 39.

⁶AJI dan Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), 1998, *Pers di Terpa Krisis, Laporan Tahunan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia tahun 1997-1998*, Jakarta, halaman 23.

menyesuaikan diri dengan kepentingan-kepentingan yang menguntungkan negara.⁷

Pada periode 1990-an, saat muncul arus keterbukaan, kebebasan, dan pemberdayaan sipil, khususnya di dunia ketiga, arus perubahan itu mulai tampak. Pemerintah yang banyak ditekan soal kondisi sosio - politik oleh negara-negara barat, mulai bersikap lunak. Pers mulai melakukan liputan-liputan kritis, seperti Kedung Ombo, Timor - timur, dikotomi ABRI dan lain-lain. Pada 21 Juni 1994, diluar dugaan pemerintah membredel SIUPP tiga media terkemuka dan bertiras besar, Majalah *Tempo*, *Editor* dan Tabloid *DeTik*. Meski pemerintah mengatakan pembredelan itu lebih disebabkan karena masalah administratif, namun tidak bisa dipungkiri tulisan di media-media itulah yang membuat bredel itu terjadi. (*Tempo* menurunkan berita pembelian kontroversial kapal-kapal perang bekas Jerman Timur, *DeTik* mengulas kebocoran dana pembangunan, dan *Editor* yang menulis soal bisnis dan kekayaan anak presiden)

Berbeda dengan kasus-kasus sebelumnya, kali ini bredel direspon dengan perlawanan dari para jurnalis dan kelompok-kelompok yang mendamba kebebasan pers. Mengharap dari organisasi profesi seperti PWI juga tidak mungkin karena sejak lama PWI terkooptasi oleh pemerintah. Hingga pada 7 Agustus 1994, berkumpul seratus jurnalis dari berbagai media, di desa Sirnagalih Bogor Jawa Barat. Pada hari itulah mereka menandatangani Deklarasi Sirnagalih. Deklarasi itu adalah menuntut dipenuhinya hak-hak publik atas

⁷M. Syafii Anwar, 1995, *Pemikiran dan aksi Islam Indonesia (Kajian Tentang Politik Cenedkiawan Indonesia)*, Jakarta: Paramadina, halaman 9.

informasi, menentang pengekangan pers, menolak organ tunggal untuk jurnalis serta mengumumkan berdirinya Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Seiring dengan tumbanganya Soeharto, AJI kemudian berkembang menjadi salah satu organisasi profesi jurnalis yang diperhitungkan. AJI menyebar di sejumlah kota besar dan ibu kota di Indonesia, termasuk di kotamakassar, AJI Makassar

Setelah deklarasi pendirian AJI di sirnagalih , Bogor, 7 Agustus 1994, AJI melakukan kongres pertama pada tahun 1996 di cimanggis . untuk membentuk kepengurusan di seluruh Indonesia, AJI mengundang beberapa perwakilan dari daerah termasuk dari Kota Makassar.

Di makassar AJI mengundang Wahyudin Djalil, mahasiswa fakultas hukum Universitas hasanuddin yang di kenal sebagai aktifis pers kampus pada saat itu. Sekembalinya dari kongres, Wahyudin pun mendapatkan mandat yang tertuang dalam surat keputusan (SK) sebagai coordinator AJI indonesia timur. Dengan membawa semangat AJI yang mendukung kebebasan pers, maka Wahyudin yang merupakan penggiat penerbitan kampus(PK) Identitas Universitas Hasanuddin makassar, bersama sejumlah aktifis kampus, membentuk unik kegiatan pers mahasiwa. Yang dimana produk pers pada saat itu adalah catatan kaki dan tabloid aliansi yang di terbitkan dengan cara difotokopi.⁸

⁸Abdurrahman Surjomiharjo, 2002, *Beberapa Segi Perjuangan Sejarah Pers di Indonesia*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, halaman 142

Untuk menyuarakan semangat kebebasan pers, para mahasiswa memanfaatkan tabloid aliansi untuk menulis pemikiran mereka. Termasuk sejumlah berita. Karena masih dalam era pemerintahan soeharto (para reformasi), tabloid Aliansi ini menjadi gerakan bawah tanah. Karena disebar secara sembunyi - sembunyi. Mahasiswa yang terlibat dalam gerakan bawah tanah ini antara lain Akbar Endra, Ano Suparno, Anwar, dan Muannas.

Kenapa semangat AJI lebih banyak dijalankan oleh pers kampus, Karena pada waktu itu. Wahyuddin Jalil, pekerja pers khususnya yang ada di fajar grup sebagai salah satu media besar di kota Makassar pada saat itu, masih banyak yang memandang bisnis terhadap gerakan AJI.

Karena berhasil menyelesaikan kuliah di fakultas hukum, Wahyuddin hijrah ke Jakarta. Sehingga selama dua tahun memegang mandat, AJI Makassar secara kelembagaan belum terbentuk dengan resmi. Begitupula dengan anggotanya tidak ada yang tercatat secara resmi. Pada tahun 1998, Wahyuddin mendengar jika, ketua AJI Indonesia yang dijabat Santoso sering melakukan komunikasi dengan wartawan fajar Sukriansyah S Latief. Hubungan mereka sangat intens karena sama - sama mengerjakan proyek ISAI.⁹

Akhirnya Sukriansyah yang mewujudkan berdirinya AJI Makassar pada awal tahun 1998, kata Wahyuddin. Sukriansyah S. Latief sebagai ketua AJI Makassar pertama, keinginan mereka sebagian Jurnalis Makassar mendirikan AJI Kota karena saat itu, PWI sebagai satu - satunya organisasi wartawan tidak bisa

⁹Sidney Jones, 1999, *Membelenggu Kebebasan Dasar (3 Kebebasan Dasar Di Asia)*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) halaman 72.

berbuat banyak terhadap pembredelan dan tekanan terhadap wartawan dan media.¹⁰

Setelah terbentuknya AJI kota Makassar, bukan berarti, AJI Makassar bisa bergerak dengan leluasa. Namun setelah pemerintahan Soeharto tumbang, AJI Makassar akhirnya berani muncul dan menyuarakan kebebasan pers secara terang-terangan, salah satu poin yang selalu diperjuangkan adalah kebebasan Pers yang mengangkat harkat dan martabat masyarakat Indonesia.

Di era keterbukaan informasi sekarang tidak terjadi lagi seperti hal di atas, namun kekerasan yang dihadapi adalah berupa tindak penganiayaan. Didalam melakukan kegiatan jurnalistik, jurnalis masih kerap mendapatkan kekerasan di sengaja ataupun tidak di sengaja, yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak suka dengan kerja - kerja jurnalis, tidak main - main jurnalis kerap mendapat ancaman keselamatan, perampasan alat, pemukulan hingga pelemparan batu dan anak panah, masih terus dialami kaum jurnalis, tidak terkecuali di kota makassar.

Penganiayaan sendiri dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) diatur pada bab xx pasal 351 sampai 358. Penganiayaan merupakan istilah yang digunakan KUHP untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut

1. Kekerasan yang dilarang ialah perbuatan, kekerasan yang merupakan alat atau upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya

¹⁰Antonio Gramsci, 2000, *Menjadi Intelektual Organik*, Yogyakarta: Insist Pers, halaman 85.

merusak barang atau menganiaya orang lain, atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang. Misalnya perbuatan melempar batu pada kerumunan orang kepada suatu barang, mengobrak-abrik barang dagangan hingga berantakan, atau membalikkan kendaraan. Jadi, biasanya kelompok atau massa yang marah dan beringas, tanpa berpiki rakibat perbuatannya mereka melakukan tindakan kekerasan, sehingga terjadi kerusuhan, kebakaran, orang lain luka atau bahkan mati.

2. Kekerasan yang dilakukan di muka umum atau disebut juga kejahatan terhadap ketertiban umumnya itu di tempat orang banyak, dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut.
3. Kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
4. Kekerasan yang dilakukan tersebut ditujukan kepada: orang atau barang atau hewan, binatang, baik itu kepunyaannya sendiri maupun kepunyaan orang lain.

Perusakan barang, luka dan mati sebagai akibat, berbeda dengan perusakan barang (pasal 406 KUHP), didalam pasal 170 KUHP tidak disebutkan bahwa barang itu kepunyaan orang lain. Hakim dalam memutuskan harus meresapi jiwa dan sejarah pasal itu.

Kekerasan atau (*geweld*) dipidana lebih berat daripada dengan sengaja merusak barang. Jadi, ada kemungkinan diterapkan pasal 406 KUHP (termasuk barang) sebagai pasal. Subsidi air (*concursum*). Dalam hal penganiayaan

menjadi lain jika terjadi luka. Dalam hal ini ada pemberatan pidana secara khusus. Kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka, luka berat atau luka mati di pidana lebih berat berdasarkan ayat (2) butir 1, 2, dan 3 pasal 170 KUHP. Lebih berat gabungan delik: kekerasan penganiayaan yang mengakibatkan orang mati.¹¹

Setelah orde baru tidak ada lagi intimidasi secara terang-terangan yang dilakukan oleh pemerintah namun kekerasan terhadap jurnalis terus berulang, ini bertentangan UUD bahwa semua warga Negara berhak mendapatkan informasi yang diperlukan dalam membangun secara bebas pemikirannya maka ini berkaitan dengan tersedianya informasi secara bebas, baik informasi social maupun estetis ditengah masyarakat kegiatan ini menjadi penyangga bagi terbangun perdaban informasi di dewasa ini

Pers sebagai sumbu komunikasi mempunyai posisi yang sangat penting khusus di Indonesia, ia menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat atau antar masyarakat itu sendiri, itu sebabnya pers mempunyai fungsi yang sangat melekat pada dirinya yakni sebagai pemberi informasi, pendidik, pengontrol social, hiburan maupun sarana perjuangan bangsa. Hal ini terlihat pada masa pra kemerdekaan, yang antara lain tugasnya mendorong lahirnya kesadaran nasional.¹²

Di dalam UU no 40 tahun 1999 tentang pers di katakan bahwa pers merupakan wujud dari salah satu kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip, demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum dengan demikian pers harus di ukur diri

¹¹Andi Hamzah, *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. (Jakarta: SinarGrafika, 2014). h. 6-8

¹² R. Rahmadi, *Pebandingan system pers* (Jakarta: gramedia, 1990). Hlm. 183

sejauh mana Negara melindungi keselamatan jurnalis dalam menjalankan tugasnya, juga dari kesadaran semua pihak menyelesaikan keberatan atas pemberitaan media secara beradab, dan tanpa kekerasan fisik keselamatan wartawan masih memperhatikan khusus di Indonesia.¹³

Kekerasan secara fisik terus mengalami peningkatan. penganiayaan merupakan salah satu bentuk kekerasan yang masih sering terjadi di masa yang sering di sebut “era terbuka informasi. AJI Indonesia juga membenarkan bahwa kekerasan terhadap jurnalis kian mengalami peningkatan. Dari 27 kasus di 2009 terjadi peningkatan menjadi 51 kasus pada 2010, yang mana sebagian besar merupakan penganiayaan fisik¹⁴

Menurut catatan Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), penganiayaan terhadap jurnalis jumlahnya semakin meningkat bahkan terdang kasus jurnalis korban penganiayaan ini menguap begitu saja di dalam sidang tidak ada solusi atau penanganan lebih lanjut. Kebanyakan kasus-kasus yang menimpa jurnalis Indonesia selesai dengan perdamaian di mediasi Dewan Pers, namun perdamaian itu tidak serta merta menghentikan proses pidana yang berlangsung.¹⁵

Dalam penjelasan pasal 8 undang-undang no 40 tahun 1999 tentang Pers, di sebutkan bahwa, yang di sebut dengan perlindungan hukum adalah, jaminan perlindungan dan atau masyarakat kepada jurnalis dalam melaksanakan fungsi, hak,

¹³ Agus Sudibyo , “cermin retak kemerdekaan pers “/on-line/http ;//www.dewan.pers.or.id. di akses/10 oktober 2016/pukul 2:30

¹⁴ Ignatius Haryanto, Digitalisasi dan Media Sosial: Berkah Kutukan (Jakarta:Aliansi jurnalis Independen(AJI) Indonesia, 2012, hlm, 26

¹⁵ Dewan Pers., (On line), <http://www.DewanPers.org/dprs.php>(11 oktober 2016)

kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.¹⁶

Kekerasan terhadap jurnalis sering terjadi berulang-ulang, khususnya di Makassar dan sekitarnya. Di Makassar sendiri sudah banyak wartawan yang mengalami kekerasan baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik seperti perekam, kamera dan handycam. Contohnya kasus kekerasan yang terjadi di kampus UNM Makassar. Ada beberapa wartawan dari berbagai media yang mengalami kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di antaranya Ikhasan Arham, (fotografer Harian Rakyat Sulsel), Iqbal Lubis (Fotografer Koran Tempo Makassar), Ikrarar (Jurnal Selebes TV), dan Vincent Waldy (Jurnalis Metro TV).

17 Mei 2015 sejumlah wartawan Makassar di larang untuk meliput rekonstruksi kasus pemalsuan dokumen kependudukan yang menjerat mantan ketua KPK Abraham Samad, di kantor Kecamatan Panakukang. Tidak cukup sampai di situ kekerasan berlanjut pada wartawan Go TV Aksa, Terkena panah saat meliput di Unismuh Makassar dan menyebabkan luka serius hingga dibawa ke RS. 10 September 2015 Jurnalis Koran Tempo Makassar, Didit Hariyadi, menjadi korban begal, dilakukan oleh orang yang tidak dikenal. Dan kekerasan ini harus dikawal oleh lembaga profesi wartawan yang ada di Makassar salah satunya Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk menggambarkan bagaimana Peran AJI dalam mengawal dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan yang ada di kota Makassar.

¹⁶ Penjelasan atas undang-undang Republik Indonesia no 40 thn 1999 tentang Pers, Ps. 18

¹⁷ <http://Tempo.co> Makassar/2015/12/berita-kriminal.html?m=1 (diakses pada pukul 11:43 wita hari Rabu, 13 April 2016)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian di atas yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat di kemukakan sub permasalahan pokok sebagai kerangka acuan dan dalam pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana proses penyelesaian kasus kekerasan terhadap wartawan kota Makassar (Study kasus peran Aliansi Jurnali Independen (AJI) Kota Makassar dalam mengawal kasus kekerasan terhadap Jurnalis Makassar) tersebut di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam kajian ini akan dianalisis secara teoritik ke dalam beberapa sub masalah berikut:

1. Bagaimana fenomena kekerasan jurnalis makassar?
2. Bagaimana AJI makassar dalam mengawal dan menyelesaikan kasus kekerasan jurnalis makassar?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Untuk menghindari pembahasan secara universal dan keluar dari pokok masalah yang akan diteliti, maka peneliti memberikan pembatasan-pembatasan.

Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah: **Peran Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Makassar dalam mengawal kasus kekerasan terhadap Jurnalis Makassar.** Fokus penelitian tersebut kemudian dideskripsikan sebagai berikut:

1. Aliansi Jurnalis Independen atau AJI adalah organisasi profesi jurnalis, yang didirikan oleh parawartawan muda indonesia pada tuju agustus 1994 di

bogor jawabarat, melalui penandatanganan suatu deklarasi yang disebut "Deklarasi Sirnagalih"

2. kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.
3. Jurnalis adalah seorang yang melakukan jurnanisme, yaitu orang yang secara teratur menuliskan berita (berupa laporan) dan tulisannya dikirimkan/dimuat di media massa secara teratur

D. Kajian Pustaka /Penelitian Relevan

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa penelitian yang relevan yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan proposal penelitian ini atau riset yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul "Perlindungan hukum terhadap wartawan yang mengalami kekerasan dalam kegiatan jurnalistik" Kariya Triana Puspita Sari, dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2013, dalam skripsinya Triana menggunakan pendekatan Kualitatif, dalam skripsi ini Triana Puspita Sari menulis, bagaimana peran pemerintah dalam mengawal kasus kekerasan terhadap jurnalis disaat melakukan peliputan. Sedangkan calon peneliti akan terfokus pada bagaimana peran dan fungsi AJI Kota Makassar dalam mengawal kasus kekerasan terhadap jurnalis Makassar.

2. Skripsi dengan judul, “Sikap mahasiswa terhadap pemberitaan kekerasan terhadap wartawan Indonesia Provinsi medan dan pemberitaan terhadap wartawan Indonesia di metro Tv, kariya Elfira Novial Kamil dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik tahun 2012 dalam skripsinya, Elfira menggunakan metode penelitian kualitatif, dalam skripsinya Elfira menulis skripsi bagaimana sikap mahasiswa terhadap pemberitaan kekerasan terhadap wartawan Indonesia di Metro Tv, sedangkan calon peneliti akan fokuskan penelitian pada peran AJI Makassar dalam mengawal kasus kekerasan terhadap jurnalis di Makassar. Dengan menggunakan metode penelitian yang sama, yaitu kualitatif. Dengan menggunakan data dan dokumen yang akan menjadi mendukung penelitian.

Tabel 1.

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	<p>Triana Puspita Sari</p> <p>Jurnal Skripsi Implementasi</p> <p>“Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Melakukan Kegiatan Jurnalistik”</p> <p>Universitas Atma Jaya Yogyakarta</p> <p>2013</p>	<p>Jenis penelitian kualitatif</p> <p>Objek yang diteliti sama-sama Kekerasan terhadap jurnalis.</p>	<p>) Penelitian ini terfokus kepada perlindungan hukum terhadap wartawan yang mengalami kekerasan.) sedangkan penelitian peneliti lebih fokus ke peran Aji dalam mengawal kekerasan terhadap wartawan.</p>

2.	<p>(Studi Korelasional Tentang Hubungan Antara Sikap Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi “Pembangunan” (Stik Elfira Novial Kamil Sikap Mahasiswa Terhadap Pemberitaan Kekerasan Wartawan Indonesia Medan Dan Pemberitaan Kekerasan Terhadap Wartawan Indonesia Di Metro TV) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Komunikasi Surabaya 2012</p>	<p>J Jenis penelitian kualitatif. J Teknik analisi data sama sama mengumpulkan data seperti gambar</p>	<p>J Penelitian ini terfokus kepada Mahasiswa. J Sedangkan penelitian peneliti fokus kepada Aliansi Jurnalis Independent (AJI)</p>
----	---	--	--

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan oleh calon peneliti adalah:

- a. Untuk mengetahui pemahaman kekerasan terhadap wartawan menurut AJI Makassar?
- b. Untuk mengetahui peran Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap wartawan di kota Makassar?

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara akademis maupun praktis.

- a. Secara Teoritis
 - 1) Peneliti ini diharapkan berguna dan memberikan sumbangan bagi pengembangan tentang ilmu kejournalistikan kedepanya, dan sebagai contoh kariya tulis kedepanya.
 - 2) Menyumbangkan bahan kepustakaan dengan harapan dapat mejadi koleksi tulisan ilmiah yang bermanfaat untuk generasi selanjutnya.
- b. Secara Praktis

Dari segi praktis yaitu sebagai salah satu panduan praktis bagi mahasiswa maupun instansi umum dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) sehingga dapat menghasilkan jurnalis-jurnalis yang profesional dan independen dalam semua bidang.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Komunikasi*

Komunikasi adalah hal yang paling wajar dalam pola tindakan manusia, tetapi juga paling komplis dan rumit. Bagaimana tidak, komunikasi sudah berlangsung semenjak manusia lahir, dilakukan secara wajar dan leluasa seperti halnya bernafas. Namun ketika harus membujuk, membuat tulisan, mengemukakan pikiran dan menginginkan orang lain bertindak sesuai dengan harapan kita, barulah disadari bahwa komunikasi adalah sebuah disiplin ilmu yang harus dipelajari.

Komunikasi adalah penyampaian informasi atau adanya saling pengertian dari seseorang kepada orang lain. Bagaimanapun komunikasi dipandang penting dalam kehidupan kita, baik sebagai individu maupun sebagai anggota keluarga, organisasi dan sebagai anggota masyarakat.¹⁸

Komunikasi merupakan sebuah “proses” dalam mewujudkan persamaan di antara orang yang melakukan hubungan antara satu sama lain. Kemudian sebagai sebuah disiplin ilmu, maka ilmu komunikasi mempelajari dan meneliti tentang perubahan sikap dan pendapat yang diakibatkan oleh informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain.

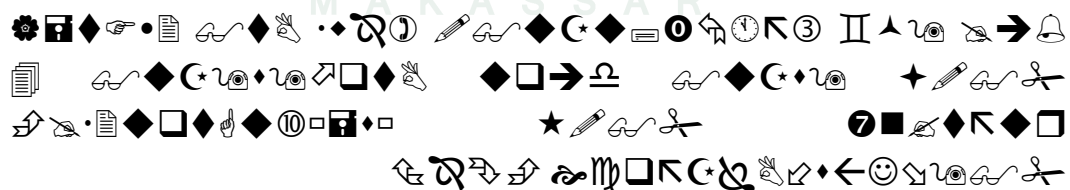
Komunikasi mempunyai dua fungsi umum. Pertama, untuk kelangsungan hidup diri sendiri yang meliputi: keselamatan fisik, meningkatkan kesadaran pribadi, menampilkan diri kita sendiri kepada orang lain dan mencapai ambisi

¹⁸ Amir Purba . *Pengantar Ilmu Komunikasi*. (Medan: Pustaka Bangsa Press. 2006) h. 34

pribadi. Kedua, untuk kelangsungan hidup masyarakat, tepatnya untuk memperbaiki hubungan sosial dan mengembangkan keberadaan suatu masyarakat.¹⁹

Jurnalisme berarti pekerjaan mengumpulkan, menulis, mengedit, dan menerbitkan berita. Tujuan utama jurnalisme adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan warga agar mereka bisa hidup bebas dan mengatur diri sendiri. Media membantu kita mendefinisikan komunitas kita, menciptakan bahasa yang dipakai bersama dan pengetahuan yang dipakai bersama. Pengetahuan yang berakar pada realitas. Jurnalisme juga membantu mengenali tujuan komunitas, para pahlawan dan para penjahat.

Pengaruhnya yang besar dan langsung terhadap opini publik, jurnalisme tidak bisa dipandu hanya oleh kekuatan ekonomi, keuntungan dan kepentingan khusus. Sebaliknya jurnalisme harus dihayati sebagai misi yang dalam batas tertentu dianggap suci, bertindak-tanduk dengan pemahaman bahwa cara berkomunikasi yang kuat telah dipercayakan kepada Anda demi kebaikan antar sesama. Allah berfirman QS At-Taubah 51.



Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan

¹⁹Mulyana. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. (Mei : 2005) h. 1

kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.²⁰

Beramal artinya beraktifitas dalam dan demi hidup dan kehidupan. Karena dalam Islam tidak dikenal pemisahan antara dunia – akhirat, agama – dunia, maka segala aktifitas hidup dan kehidupan merupakan amal yang diperintahkan oleh Islam. Segala bentuk pekerjaan atau perbuatan bagi seorang muslim dilakukan dengan sadar dan dengan tujuan yang jelas yaitu sebagai bentuk pengabdian kepada Allah semata-mata sebagaimana firmanNya: “tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan kepadaKu” (QS Az-dzariyat/ 51 : 56)

B. Media massa

Media massa adalah alat atau sarana yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber (komunikator) kepada khalayak (komunikan/ penerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis, seperti surat kabar, radio, televisi, film, dan internet.²¹

McQuaill dalam bukunya *Mass Communication Theories* menyatakan ada enam perspektif tentang peran media massa dalam konteks masyarakat modern, yaitu sebagai berikut.

1. Media massa sebagai sarana belajar untuk mengetahui berbagai informasi dan peristiwa. Ia ibarat “jendela” untuk melihat apa yang terjadi di luar kehidupan.

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Jakarta Press 2006)h. 201.

²¹ Indah Suryawanti. *Jurnalistik Suatu Pengantar Teori dan praltik*. h 37

2. Media massa adalah refleksi fakta, terlepas dari rasa suka atau tidak suka. Ia ibarat “cermin” peristiwa yang ada dan terjadi di masyarakat ataupun dunia.
3. Media massa sebagai filter yang menyeleksi berbagai informasi dan isu yang layak mendapat perhatian atau tidak.
4. Media massa sebagai penunjuk arah berbagai ketidakpastian atau alternatif yang beragam.
5. Media massa sebagai sarana untuk mensosialisasikan berbagai informasi atau ide kepada public untuk memperoleh tanggapan/umpan balik.
6. Media massa sebagai interkulator, tidak sekedar tempat “lalu lalang” informasi, tetapi memungkinkan terjadinya komunikasi yang interaktif.²²

Menurut F. Bond ada empat fungsi jurnalistik, yaitu sebagai berikut :

1. *To Inform* (untuk menginformasikan)

Jurnalistik merupakan sarana untuk menginformasikan fakta dan peristiwa yang terjadi di sekitar kehidupan manusia yang patut diketahui oleh publik.

2. *To Interpret* (Untuk menginterpretasikan)

Jurnalistik merupakan sarana untuk memberikan tafsiran atau interpretasi terhadap fakta dan peristiwa yang terjadi, sehingga publik dapat memahami dampak dan konsekuensi dari berita yang disajikan.

3. *To guide* (untuk mengarahkan)

Jurnalistik merupakan acuan untuk mengarahkan atau memberi petunjuk dalam menyikapi suatu fakta dan peristiwa yang disajikan dalam berita

²²Indah Suryawanti. *Jurnalistik Suatu Pengantar Teori dan praltik*. h. 37

sehingga dapat menjadi pedoman bagi public dalam memberi komentar, pendapat, opini atau dalam mengambil keputusan.

4. *To entertaint* (untuk menghibur)

Jurnalistik merupakan sarana untuk menghibur, menyegarkan, dan menyenangkan pembaca dengan menyajikan berita atau informasi yang ringan dan rileks sesuai dengan kebutuhan gaya hidup manusia.²³

Sementara Onong Uchjana Effendy menjabarkan fungsi yang melekat pada jurnalistik sebagai berikut :

a. Fungsi menyiarkan informasi (*to inform*)

Ini merupakan fungsi jurnalistik yang pertama dan paling utama. Khalayak pembaca berlangganan atau membeli surat kabar karena memerlukan informasi mengenai berbagai hal di bumi ini, mengenai kejadian atau peristiwa yang terjadi, gagasan atau pikiran orang lain, apa yang dikatakan orang lain dan sebagainya.

b. Fungsi mendidik (*to educate*)

Fungsi jurnalistik sebagai sarana pendidikan massa (*mass education*) media cetak (misalnya, surat kabar, majalah, dan tabloid) memuat tulisan tulisan yang mengandung pengetahuan. Begitu pula dengan media elektronik yang menayangkan program acara yang mendidik, sehingga khalayak bertambah pengetahuannya. Menyangkut fungsi mendidik pada media cetak, bisa dalam bentuk artikel atau tajuk rencana secara implicit,

²³Indah Suryawanti. *Jurnalistik Suatu Pengantar Teori dan Pratik* h. 38

atau cerita bersambung atau berita bergambar yang mengandung unsure pendidikan.

c. Fungsi menghibur (*to entertain*)

Hal-hal yang bersifat hiburan sering dimuat oleh surat kabar dan majalah untuk mengimbangi berita-berita berat (*hard news*) dan artikel yang berbobot. Isi media cetak (surat kabar, majalah, dan tabloid) yang bersifat menghibur bisa berbentuk cerita pendek, cerita bersambung, cerita bergambar, teka-teki silang pojok, karikatur. Tidak jarang juga, berita yang mengandung minat insane (*human interest*), dan kadang-kadang tajuk rencana sedangkan isi media elektronik yang sifatnya menghibur bisa dalam bentuk tayangan lawak atau komedi, kuis, sinetron, penayangan film, musik, dan masih banyak lagi. meski pemuatan atau penayangan isi mengandung hiburan, itu semata-mata untuk melemaskan ketegangan pikiran setelah para pembaca dihadangkan berita dan artikel yang berat.

d. Fungsi mempengaruhi (*to influence*)

Fungsi inilah yang menyebabkan pers memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Jurnalistik merupakan sarana untuk mempengaruhi pendapat dan pikiran orang lain tentang fakta dan peristiwa yang sedang menjadi topik pembicaraan yang aktual dan faktual.

Sehubungan dengan pernyataan di atas, Napoleon pada masa jayanya pernah mengatakan bahwa ia lebih takut kepada empat surat kabar dari pada seribu

serdadu dengan senapan bersangkur. Sudah tentu surat kabar yang ditakuti adalah ini ialah surat kabar yang *independent*, yang bebas menyatakan pendapatnya, bebas melakukan kontrol sosial, bukan surat kabar yang membawakan “*his master voice*” fungsi memengaruhi dari surat kabar, secara implisit, terdapat pada tajuk rencana dan artikel²⁴.

C. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

AJI adalah salah satu organisasi profesi wartawan. AJI lahir sebagai perlawanan komunitas pers Indonesia terhadap kesewenang-wenangan rezim Orde Baru. Mulanya adalah pemberedelan Detik, Editor dan Tempo, 21 Juni 1994. Ketiganya diberedel karena pemberitaannya yang tergolong kritis kepada penguasa. Tindakan represif inilah yang memicu aksi solidaritas sekaligus perlawanan dari banyak kalangan secara merata di sejumlah kota.

Gerakan perlawanan terus mengkristal. Akhirnya, sekitar 100 orang yang terdiri dari jurnalis dan kolumnis berkumpul di Sirnagalih, Bogor, 7 Agustus 1994. Pada hari itulah mereka menandatangani Deklarasi Sirnagalih. Inti deklarasi ini adalah menuntut dipenuhinya hak publik atas informasi, menentang pengekangan pers, menolak wadah tunggal untuk jurnalis, serta mengumumkan berdirinya AJI.

Untuk menjelaskan secara teoritis kemunculan AJI sebagai organisasi profesi tandingan dari PWI, digunakan teori *pseudo affiliation* (afiliasi seolah-olah) milik Antonio Gramsci. Gramsci menjelaskan bahwa dalam afiliasi individu atau kelompok dalam suatu organisasi, terbuka peluang untuk bersifat sementara

²⁴Indah Suryawanti. *Jurnalistik Suatu Pengantar Teori dan praltik* h. 39

dan tidak bertahan lama. Keharusan untuk berafiliasi dengan organisasi tertentu akan membuat pembusukan dari dalam, yang akhirnya pecah menjadi afiliasi baru. Afiliasi baru ini kemudian menjadi organisasi tandingan, yang tujuannya bisa sangat berbeda dengan organisasi awalnya. AJI muncul sebagai afiliasi baru dari PWI, yang dirasa semakin jauh tenggelam sebagai alat penguasa.²⁵

Kebebasan pers merupakan salah satu syarat negara demokratis. Dengan kebebasan pers pula, masyarakat akan terberdayakan dalam mengontrol penguasa, serta menjadi bagian dalam penyelenggaraan negara, dan bukan sebaliknya. Sidney Jones, seorang Indonesianis asal Amerika Serikat meneliti kondisi politik Indonesia, termasuk tentang konflik antara pers dan penguasa.

Buku berjudul *Anjing Penjaga, Pers di Rumah Orde Baru*, karya Omi Intan Naomi, juga menjadi referensi penting, karena Omi meneliti tentang bentuk-bentuk penguasa kepada media, yang dilakukan oleh pejabat Deppen, militer, polisi dan politisi.

Tidak kalah penting adalah ceramah dari Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika Departemen Penerangan Sukirno. Mengapa? Selama ini pemerintah Orba menggunakan istilah Pers Pancasila sebagai tipologi pers Indonesia, sehingga karakter pers Indonesia harus sesuai dengan budaya Pancasila. Sebagai perwujudan karakter bangsa, maka kebebasan pers di Indonesia menurut pemerintah tidak bisa dipersamakan dengan kebebasan pers di negara lain, khususnya negara-negara barat yang liberal. Buku ini menerangkan berbagai

²⁵ Dhanil Dhakidae *kenangan Inspirasi orde lama dan orde baru* (Bandung : Cakrawala Press 2003). H 57

contoh soal definisi pers menurut Orba, yang sering digunakan saat berbicara soal pers.

Bagaimana kondisi dan peta politik Indonesia pada periode 1990-an, dimana Orba mulai mengalami kemerosotan meskipun posisinya masih cukup kuat? Bagaimana, Pemerintahan Orba yang totaliter, bisa melunak dan memberi angin pada analisis tajam dan kritis pada pers? Anders Uhlén yang mengungkapkan bahwa, Orba dipaksa mengikuti arus keterbukaan yang melanda dunia ketiga di awal tahun 1990-an. Perkembangan politik juga mengalami banyak perubahan menuju era keterbukaan, yang berpengaruh besar pula terhadap dunia pers Indonesia. Lontaran keterbukaan menjadi hal yang lazim diucapkan, dan segera disambut oleh media, dengan pemberitaan-pemberitaan yang lebih kritis.

UU Pers ditetapkan pada 23 September 1999 sebagai kontrak sosial yang baru negara terhadap warganegaranya dalam kegiatan pers. Karena itu penggunaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga historis, karena KUHP adalah produk hukum lama yang merupakan warisan buatan penjajah Belanda terhadap negara jajahannya.²⁶

Substansi yang ada dalam UU Pers ini menempatkan pers dengan peran, fungsi, hak, dan kewajiban untuk selalu melakukan kontrol sosial dalam masyarakat, pasca reformasi yang mengakhiri pemerintahan otoriter mantan Presiden Soeharto selama 30 tahun. Maka itu kemerdekaan pers akan tetap menjunjung tinggi lancarnya proses reformasi dengan tetap konsisten melancarkan kritik terhadap pemerintah. Selain itu juga alasan mengapa

²⁶ Samsul Wahidin, *Hukum Pers*. (Yogyakarta:PustakaPelajarCelebanTimur 2006). H 186

pentingnya UU Pers sebagai *lex specialis* adalah tidak pernah adanya negara yang jatuh bangkrut karena menjamin kemerdekaan pers. Hal ini telah terbukti di beberapa negara yang telah menerapkan kemerdekaan pers untuk melakukan kontrol sosial sejak lama bahkan ratusan tahun dan mereka tetap bisa mau dan kaya.

Perlindungan hukum adalah upaya yang seharusnya ditempuh dalam rangka mencegah munculnya arogansi pers. Dalam penjelasan pasal 8 UU No. 40 tahun 1999 yang dimaksudkan dengan perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak dan kewajiban dan perannya sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.²⁷

D. jurnalis

Jurnalis menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 tentang pers, termuat dalam pasal 4 menyatakan, jurnalis adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik, mencari mengumpulkan data mengedit dan menyebarluaskan melalui media massa

Mantan Jaksa Agung, Ali Said menganggap wartawan adalah wakil rakyat tanpa pemilu, sebab pekerjaannya selalu menulis untuk kepentingan rakyat. Kekuasaannya lebih tinggi dari penguasa. Wartawan sering sekali mendapat predikat pendidik informal dan menghibur, sebutan lebih kompleks dari guru dan jenderal²⁸.

²⁷SamsulWahidin, *Hukum Pers*. (Yogyakarta:PustakaPelajarCelebanTimur 2006). H 187

²⁸Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat. *Jurnalistik Teori dan Praktik*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2008) h. 88.

Wartawan adalah seseorang yang bekerja dan mendapatkan gaji/nafkah sepenuhnya dari media massa berita.²⁹

Mengingat beratnya tugas wartawan sehingga ia harus memiliki kriteria-kriteria. Wartawan adalah sebuah profesi yang terbuka bagi siapa saja, pria dan wanita dengan latar belakang pendidikan apa saja. Ada beberapa kriteria wartawan yang baik, antara lain; punya rasa ingin tahu yang besar, berkepribadian, kuat fisik dan mental, punya integritas, berdaya cium berita tinggi, jujur dapat dipercaya, berani, tabah dan tahan uji, cermat, cepat, punya daya imajinasi tinggi, gembira, optimisme, punya rasa humor, punya inisiatif, dan kemampuan menyesuaikan diri, Wartawan adalah suatu profesi yang penuh tanggung jawab dan memiliki resiko yang cukup besar. Untuk profesi semacam ini diperlukan manusia-manusia yang memiliki idealisme dan ketangguhan hati yang kuat untuk menghadapi berbagai kendala, hambatan dan tantangan dalam menjalankan profesinya.³⁰

E. Independensi

Makna “independen” bukan berarti “netral” seperti yang sering disalahpahami oleh publik. Netralitas hanyalah salah satu sikap atau pendirian wartawan dalam kebijaksanaan redaksional ketika hendak menyiarkan pemberitaan. Tetapi independensi wartawan mengandung makna lebih luas dari netralitas, yaitu sikap atau pendirian apa pun termasuk netral atau imparsial sesuai dengan pertimbangan

²⁹ Dja'far Assegaf. *Jurnalistik Masa Kini*. (Jakarta: Ghalia Indonesia 1991) h. 142.

³⁰ KurniawanJunaedhi. *Ensiklopedia Pers Indonesia*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 1991) h. 272.

profesional wartawan dengan mengingat tujuan pemberitaan demi kepentingan umum.

Independensi juga berarti bahwa wartawan tidak dapat ditekan oleh campur tangan dari pihak manapun, termasuk dari pemilik perusahaan pers itu sendiri. Kode Etik Jurnalistik yang disepakati oleh 29 organisasi wartawan dan perusahaan pers pada 14 Maret 2006 dan dikukuhkan oleh Dewan Pers pada 24 Maret 2006, menegaskan dalam Pasal 1; “Wartawan Indonesia bersikap independen”. Penafsiran kode etik itu mengatakan; “Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan dan intervensi pihak lain.

Mengatakan bahwa seorang wartawan tidak mencari teman dan juga tidak mencari musuh. Walaupun kadang sulit untuk menolak jasa baik seseorang, tetapi bukan berarti menikmati yang ada dan malah akan berada pada posisi dimana independensi wartawan bisa disalahartikan karena kedekatan dengan seorang relasi. Tetapi bukan berarti wartawan menutup diri dengan dunia luar dan tidak melakukan hubungan sosial dengan orang-orang disekitarnya. Wartawan bukan seorang yang antisosial hanya berusaha untuk mengurangi hubungan yang dapat mempengaruhi independensinya terhadap sebuah pemberitaan nantinya.³¹

Misal seorang wartawan yang bertugas di sebuah pengadilan memiliki 'hubungan yang terlalu baik' dengan kepala pengadilan, suatu saat terjadi tindak korupsi di pengadilan tersebut oleh sang kepala pengadilan, bukan tidak mungkin

³¹Bill dan Tom Rosenstiel Kovach. *Sembilan Elemen Jurnalisme*. (Jakarta: Yayasan Pantau, 2001). h 121.

kualitas pemberitaan terhadap kepala pengadilan akan berbeda dengan fakta yang sebenarnya hanya karena 'hubungan yang terlalu baik' tersebut. Independensi harus dilakukan dengan bebas nilai ditambah dengan keberanian seorang wartawan untuk mewartakan kebenaran serta berani untuk melawan berbagai tekanan yang datang kepada mereka. Agar konsep-konsep dapat diteliti secara empiris, maka harus dioperasionalkan dengan mengubahnya menjadi variabel.

Aliansi Jurnalisme Independen AJI sebagai organisasi profesi wartawan yang memiliki misi meningkatkan profesionalisme jurnalis senantiasa bersikap keras dan tegas dalam mengawal semua masalah yang dihadapi maupun keluhan maupun berupa mendapatkan tindakan kekerasan yang sifatnya sengaja ataupun tidak disengaja, yang dilakukan aparat, sipil dan siapapun yang melakukannya tindakan tindakan menhalangi, melukai, mengancam atau semacamnya.

Dan apabila ada tindakan yang dijelaskan di atas maka AJI diminta ataupun tidak diminta akan langsung mengecek kebenarannya, dan apabila jurnalis yang jadi korban maka kami akan megadfokasi sampai kasus tersebut sampai selesai, tentunya sampai tuntas, tentunya dengan koridor yang sesuai dengan aturan main.

F. Jurnalistik

1. Sejarah Jurnalistik

Secara Gamblang, orang seringkali menyamakan jurnalistik dengan pers, bahkan ada yang menyamakan jurnalistik sebagai surat kabar. Ini disebabkan oleh media massa yang pertama kali diciptakan manusia adalah surat kabar. Tak heran jika orang mencampuradukan antara jurnalistik dan media cetak.

Seiring dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, sehingga menghasilkan radio, televisi, dan film, jurnalistik pun menjadi semakin luas cakupannya. Jurnalistik tidak lagi mengelola laporan harian untuk sarana media cetak (terutama surat kabar), tetapi juga sarana media elektronik (terutama radio dan televisi). Bahkan kini telah merambah hingga ke media online (misalnya surat kabar online).³²

2. Pengertian Jurnalistik

Untuk memahami jurnalistik dapat ditinjau dari tiga sudut pandang yaitu: harfiah (etimologi), konseptual (terminology), dan praktis.

Pertama, jurnalistik secara harfiah atau terminology artinya kewartawanan atau kepenulisan. Kata dasarnya jurnal, artinya ‘laporan’ atau ‘catatan’, atau *jour* dalam bahasa Prancis yang berarti hari (*day*). Asal muasalanya dari bahasa Yunani kuno, *du jour* yang berarti ‘hari’, yakni kejadian hari ini yang diberitakan dalam lembaran tercetak. Tak heran, jika jurnalistik sering diindetikkan banyak orang dengan hal-hal yang berhubungan dengan media cetak, terutama surat kabar.³³

Kedua, jurnalistik secara konseptual (terminologi) mengandung tiga pengertian, yaitu sebagai berikut.

- a) Jurnalistik adalah proses “aktivitas” atau “kegiatan” mencari, mengumpulkan, menyusun, mengolah, mengedit, menyajikan, dan menyebarluaskan berita kepada khalayak melalui saluran media massa.
- b) Jurnalistik adalah “keahlian” (*expertise*) atau “keterampilan” (*skill*)

³² Indah Suryawanti. *Jurnalistik Suatu Pengantar Teori dan Praktek*. 3

³³ Indah Suryawanti. *Jurnalistik Suatu Pengantar Teori dan Praktek*. 4

G. Kekerasan

Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.

Dalam UU no 40 tahun 1999 tentang pers dikatakan bahwa "pers merupakan wujud dari salah satu kedaulatan rakyat yang berdasar pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum" dengan demikian kemerdekaan pers harus diukur dari sejauh mana Negara melindungi keselamatan jurnalis dalam menjalankan tugasnya, juga dari kesadaran dari semua pihak untuk menyelesaikan keberatan atas pemberitaan media secara beradab dan tanpa kekerasan fisik, dan perampasan alat, keselamatan jurnalis masih menjadi masalah serius³⁴

1. Kekerasan yang dilarang ialah perbuatan, kekerasan yang merupakan alat atau upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang itu sendiri. Misalnya perbuatan melempar batu pada kerumunan orang kepada suatu barang, mengobrak-abrik barang dagangan hingga berantakan, atau membalikkan kendaraan. Jadi, biasanya kelompok atau massa yang marah dan beringas, tanpa berpikir akibat perbuatannya

³⁴ R. Racmadi, perbandingan system pers, (Jakarta gramedia ,1990, hlm .183

mereka melakukan tindakan kekerasan, sehingga terjadi kerusuhan, kebakaran, orang lain luka atau bahkan mati.

2. Kekerasan yang dilakukan di muka umum atau disebut juga kejahatan terhadap ketertiban umum yaitu di tempat orang banyak, dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut.
3. Kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
4. Kekerasan yang dilakukan tersebut ditujukan kepada: orang atau barang atau hewan, binatang, baik itu kepunyaannya sendiri maupun kepunyaan orang lain.

Perusakan barang, luka dan mati sebagai akibat, berbeda dengan perusakan barang (pasal 406 KUHP), di dalam pasal 170 KUHP tidak disebutkan bahwa barang itu kepunyaan orang lain. Hakim dalam memutuskan harus meresapi jiwa dan sejarah pasal itu.

Kekerasan atau *geweld* dipidana lebih berat daripada dengan sengaja merusak barang. Jadi, ada kemungkinan diterapkan pasal 406 KUHP (termasuk barang) sebagai pasal. Subsidiar (*concursum*). Dalam hal penganiayaan menjadi lain jika terjadi luka. Dalam hal ini ada pemberatan pidana secara khusus. Kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka, luka berat atau luka mati dipidana lebih berat berdasarkan ayat (2) butir 1, 2, dan 3 pasal 170 KUHP. Lebih berat gabungan delik: kekerasan penganiayaan.³⁵

³⁵Andi Hamzah, *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). h. 6-8.

H. *Issues Institution Bulding Theori*

Bagaimana AJI Makassar dapat memenuhi persyaratan sebagai organisasi yang harus memiliki peran dan eksisitentensi pada lingkungan sekitarnya? Dalam buku yang berjudul “*some Issues Institution Bulding Theori*” Esmann mengatakan bahwa proses pembaharuan , tidakpernah terlaksana dengan spontan tapi butuh institusi yang punya inofatif yang bisa mengemban perubahan, menurut Esmann ada tiga prinsip yang bisa digunakan sebagai *parameter* keberhasilan organisasi atau lembaga, ketiganya mencerminkan eksistensi lembaga tersebut ditengah masyarakat. Pertama, jaringan kerja, ke dua, bagaimana lembaga tersebut diterima ditengah masyarakat, ketiga posisi atau penempatan lembaga dalam konteks sosial politik masyarakat.³⁶ Inofasi merupakan perangkat penting dalam membangun organisasi telebih pada sebuah organisasi seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang selalu mengobarkan kebasan peers, Jadi sebuah lembaga harus mempunyai relasi yang bagus serta sosialisasi yang massif untuk mendapatka hasil yang ingin dicapai.

³⁶ <http://id-jurnal.blogspot.co.id>, hal diakases pada Jumaat 2 Desember 2016

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan lokasi penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk melaksanakan penelitian, hal ini diperlukan agar penelitian lebih terarah dan rasional. Untuk itu, diperlukan metode yang sesuai dengan objek yang diangkat karena metode berfungsi sebagai cara atau petunjuk mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang optimal dan mampu dipertanggung jawabkan.³⁷

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, sedangkan definisi penelitian kualitatif adalah suatu teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data dan fakta, yang berkarakteristik kualitatif (misalnya data tersebut berupa data non-numerik transkripsi verbatim atas wacana subjek, catatan dari study observasi partisipan atau data yang berupa arsip atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian)³⁸

b. Lokasi Penelitian.

Adapun lokasi yang menjadi objek penelitian penulis yakni sekretariat AJI Makassar, Jl. Todopuli 6 Kota Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

³⁷ Indah Suryawanti. *Jurnalistik Suatu Pengantar Teori dan Praktek*. 4

³⁸ Dedy Mulyana, *Metode penelitian kualitatif* (Bandung: Pt. Remaja Rosda karya, 2002), h. 147.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan komunikasi. Secara terminologi, komunikasi dapat didefinisikan sebagai suatu mekanisme mengadakan hubungan antara sesama manusia dengan mengembangkan semua lambang-lambang atau simbol-simbol dan pikiran bersama dengan arti yang menyertainya.³⁹

Berakar pada latar alamiah sebagai kebutuhan, manusia serta alat penelitian memanfaatkan metode kualitatif, mengandalkan analisis dan induktif, mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha mengembangkan teori, bersifat deskriptif dengan mementingkan proses dari pada hasil, membatasi studi dengan fokus memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data.⁴⁰

C. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Data primer penulis peroleh dari observasi dan juga didapatkan melalui proses wawancara dengan informan.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui telaah pustaka dan dari dokumen atau arsip-arsip yang terdapat pada sekretariat Aliansi jurnalis independen.

³⁹Arifuddin Tike, *Dasar-Dasar Komunikasi : Suatu Studi dan Aplikasi* (Cet. 1 Agustus 2009, kotakembang Yogyakarta), h. 2.

⁴⁰Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. 25; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h.8.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Library Research (Riset Kepustakaan)

Library research adalah kegiatan mencari dan mengelola data-data literatur yang sesuai untuk dijadikan referensi dan di jadikan sebagai acuan dasar untuk menerangkan konsep-konsep penelitian. Berdasarkan bentuk penelitian ini, data literature yang dimaksud adalah berupa buku, ensiklopedi, karya tulis ilmiah dan sumber data lainya yang didapat dari beberapa perpustakaan.

b. Field research (Riset Lapangan)

Jenis pengumpulan data ini menggunakan beberapa cara yang dianggap relevan dengan penelitian yaitu :

1.) Observasi

Kegiatan observasi adalah kegiatan yang setiap saat kita lakukan. Dengan perlengkapan panca indera yang dimiliki manusia terutama mata dan telinga maka sebenarnya kita sering melakukan observasi dengan mengamati objek-objek disekitar kita.⁴¹

Dalam observasi ini, calon peneliti ingin mendapatkan data yang terkait dengan fokus masalah yang akan diteliti dengan cara terjun langsung kelapangan yang menjadi objek penelitian.

2.) Wawancara

⁴¹Rachmat Criyanto, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, dengan kata pengantar oleh Burhan Bungin , Edisi 1 (Cet, IV ; Jakarta, kencana, 2009), h 108

Metode wawancara atau *interview* merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tatap muka, pertanyaan diberikan secara lisan dan jawabanya pun diterima secara lisan pula.⁴²

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam yaitu suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam.⁴³

Narasumber pada penelitian ini adalah pengurus Aliasi jurnali independen AJI Makassar yaitu:

- c. Ketua : Qodriansyah Agam Sofyan
- d. Sekretaris AJI : Rahmat Hardiansyah
- e. Anggota AJI : Muhammad Idris
- f. Anggota AJI : Ridwan Marzuki

3.) Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumentasi, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.⁴⁴

Berdasarkan pengertian tersebut, penulis dengan pengumpulan data dengan teknik dokumentasi berarti peneliti melakukan pencarian dan pengambilan segala

⁴²Nana Syaodih Sukmadinata, *pengembangan kurikulum Teori dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 222.

⁴³ ²⁶Husaini Usman dan Poernomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Cet. IV; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), h. 73

⁴⁴Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: UGM Press, 1999), h. 72.

informasi yang sifatnya teks menjelaskan dan menguraikan mengenai hubungannya dengan arah penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Salah satu faktor penunjang keberhasilan sebuah penelitian adalah instrumen atau alat yang digunakan. Dalam pengumpulan data dibutuhkan beberapa alat untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian.

Penulis akan menggunakan beberapa instrument yaitu mencatat hasil observasi dan wawancara, pedoman wawancara dan telah dipustakakan seperti buku, foto dokumen serta alat penunjang seperti kamera, perekam suara dan buku catatan.

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Analisi data dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data-data bersifat penelitian kualitatif untuk menemukan yang diinginkan oleh calon peneliti. Pengelolaan data yang ada selanjutnya diinterpretasikan dalam bentuk konsep yang dapat mendukung objek pembahasan.

Setelah peneliti memperoleh data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data hasil observasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mencatat hasil dari apa yang diamati di lapangan. Pengolahan data dari hasil wawancara dilakukan dengan cara peneliti mendengarkan ulang rekaman wawancara lalu di tulis kembali. Sedangkan pengolahan data dari hasil dokumentasi dilakukan dengan mengambil gambar pada saat melakukan penelitian di AJI Kota Makassar

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

1. *Profil AJI*

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) lahir sebagai perlawanan komunitas pers Indonesia terhadap kesewenang-wenangan rejim Orde Baru. Mulanya adalah pembredelan Detik, Editor dan Tempo, 21 Juni 1994. Ketiganya dibredel karena pemberitaannya yang tergolong kritis kepada penguasa. Tindakan represif inilah yang memicu aksi solidaritas sekaligus perlawanan dari banyak kalangan secara merata di sejumlah kota.

Dan gerakan perlawanan terus mengkristal. Akhirnya, sekitar 100 orang yang terdiri dari jurnalis dan kolumnis berkumpul di Sirnagalih, Bogor, 7 Agustus 1994. Pada hari itulah mereka menandatangani Deklarasi Sirnagalih. Inti deklarasi ini adalah menuntut dipenuhinya hak publik atas informasi, menentang pengekangan pers, menolak wadah tunggal untuk jurnalis, serta mengumumkan berdirinya AJI.

Pada masa Orde Baru, AJI masuk dalam daftar organisasi terlarang. Karena itu, operasi organisasi ini di bawah tanah. Roda organisasi dijalankan oleh dua puluhan jurnalis-aktivis. Untuk menghindari tekanan aparat keamanan, sistem manajemen dan pengorganisasian diselenggarakan secara tertutup. Sistem kerja organisasi semacam itu memang sangat efektif untuk menjalankan misi organisasi, apalagi pada saat itu AJI hanya memiliki anggota kurang dari 200 jurnalis.

Selain demonstrasi dan mengecam tindakan represif terhadap media, organisasi yang dibidani oleh individu dan aktivis Forum Wartawan Independen (FOWI) Bandung, Forum Diskusi Wartawan Yogyakarta (FDWY), Surabaya Press Club (SPC) dan Solidaritas Jurnalis Independen (SJI) Jakarta ini juga menerbitkan majalah alternatif Independen, yang kemudian menjadi Suara Independen.

Gerakan bawah tanah ini menuntut biaya mahal. Tiga anggota AJI, yaitu Ahmad Taufik, Eko Maryadi dan Danang Kukuh Wardoyo dijebloskan ke penjara, Maret 1995. Taufik dan Eko masuk bui masing-masing selama 3 tahun, Danang 20 bulan. Menyusul kemudian Andi Syahputra, mitra penerbit AJI, yang masuk penjara selama 18 bulan sejak Oktober 1996.

Selain itu, para aktivis AJI yang bekerja di media dibatasi ruang geraknya. Pejabat Departemen Penerangan dan Persatuan Wartawan Indonesia juga tidak segan-segan menekan para pemimpin redaksi agar tidak memperkerjakan mereka di medianya.

Konsistensi dalam memperjuangkan misi inilah yang menempatkan AJI berada dalam barisan kelompok yang mendorong demokratisasi dan menentang otoritarianisme. Inilah yang membuahkan pengakuan dari elemen gerakan pro demokrasi di Indonesia, sehingga AJI dikenal sebagai pembela kebebasan pers dan berekspresi.

Pengakuan tak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari manca negara. Diantaranya dari International Federation of Journalist (IFJ), Article XIX dan International Freedom Expression Exchange (IFEX). Ketiga organisasi

internasional tersebut kemudian menjadi mitra kerja AJI. Selain itu banyak organisasi - organisasi asing, khususnya NGO internasional, yang mendukung aktivitas AJI. Termasuk badan-badan PBB yang berkantor di Indonesia.

AJI diterima secara resmi menjadi anggota IFJ, organisasi jurnalis terbesar dan paling berpengaruh di dunia, yang bermarkas di Brussels, Belgia, pada 18 Oktober 1995. Aktivis lembaga ini juga mendapat beberapa penghargaan dari dunia internasional. Diantaranya dari *Committee to Protect Journalist (CPJ)*, *The Freedom Forum (AS)*, *International Press Institute (IPI-Wina)* dan *The Global Network of Editors and Media Executive (Zurich)*.

Setelah Soeharto jatuh, pers mulai menikmati kebebasan. Jumlah penerbitan meningkat. Setelah reformasi, tercatat ada 1.398 penerbitan baru. Namun, hingga tahun 2000, hanya 487 penerbitan saja yang terbit. Penutupan media ini meninggalkan masalah perburuhan. AJI melakukan advokasi dan pembelaan atas beberapa pekerja pers yang banyak di-PHK saat itu.

Selain bergugurannya media, fenomena yang masih cukup menonjol adalah kasus kekerasan terhadap jurnalis. Berdasarkan catatan AJI, setelah reformasi, kekerasan memang cenderung meningkat. Tahun 1998, kekerasan terhadap jurnalis tercatat sebanyak 42 kasus. Setahun kemudian, 1999, menjadi 74 kasus dan 115 di tahun 2000. Setelah itu, kuantitasnya cenderung menurun: sebanyak 95 kasus (2001), 70 kasus (2002) dan 59 kasus (2003).

Kasus yang tergolong menonjol pada tahun 2003 adalah penyanderaan terhadap wartawan senior RCTI Ersi Siregar dan juru kamera RCTI, Ferry Santoro. AJI terlibat aktif dalam usaha pembebasan keduanya, sampai akhirnya

Fery berhasil dibebaskan. Namun, Ersya Siregar meninggal dalam kontak senjata antara TNI dan penyanderaanya, Gerakan Aceh Merdeka.

Pada saat yang sama, juga mulai marak fenomena gugatan terhadap media. Beberapa media yang digugat ke pengadilan - pidana maupun perdata adalah Harian Rakyat Merdeka, Kompas, Koran Tempo, Majalah Tempo dan Majalah Trust. Atas kasus-kasus tersebut, AJI turut memberikan advokasi.

Selain itu, AJI juga membuat program Maluku Media Center. Selain sebagai safety office bagi jurnalis di daerah bergolak tersebut, program itu juga untuk kampanye penerapan jurnalisme damai. Sebab, berdasarkan sejumlah pengamat dan analisis, peran media cukup menonjol dalam konflik bernuansa agama tersebut. Hingga kini, program tersebut masih berjalan.

Setelah rejim Orde Baru tumbang oleh “Revolusi Mei 1998”, kini Indonesia mulai memasuki era keterbukaan. Rakyat Indonesia, termasuk jurnalis, juga mulai menikmati kebebasan berbicara, berkumpul dan berorganisasi. Departemen Penerangan, yang dulu dikenal sebagai lembaga pengontrol media, dibubarkan. Undang-Undang Pers pun diperbaiki sehingga menghapus ketentuan-ketentuan yang menghalangi kebebasan pers.

AJI, yang dulu menjadi organisasi terlarang, kini mendapat keleluasaan bergerak. Jurnalis yang tadinya enggan berhubungan dengan AJI, atau hanya bisa bersimpati, mulai berani bergabung. Jumlah anggotanya pun bertambah. Perkembangan jumlah anggota akibat perubahan sistem politik ini, tentu saja, juga mengubah pola kerja organisasi AJI.

AJI tak bisa lagi sekadar mengandalkan idealisme dan semangat para aktivisnya untuk menjalankan visi dan misi organisasi. Pada akhirnya, organisasi ini mulai digarap secara profesional. Bukan hanya karena jumlah anggotanya yang semakin banyak, namun tantangan dan masalah yang dihadapi semakin berat dan kompleks.

Sejak berdirinya, AJI mempunyai komitmen untuk memperjuangkan hak-hak publik atas informasi dan kebebasan pers. Untuk yang pertama, AJI memposisikan dirinya sebagai bagian dari publik yang berjuang mendapatkan segala macam informasi yang menyangkut kepentingan publik.

Mengenai fungsi sebagai organisasi pers dan jurnalis, AJI juga gigih memperjuangkan dan mempertahankan kebebasan pers. Muara dari dua komitmen ini adalah terpenuhinya kebutuhan publik akan informasi yang obyektif.

Untuk menjaga kebebasan pers, AJI berupaya menciptakan iklim pers yang sehat. Suatu keadaan yang ditandai dengan sikap jurnalis yang profesional, patuh kepada etika dan jangan lupa mendapatkan kesejahteraan yang layak. Ketiga soal ini saling terkait. Profesionalisme plus kepatuhan pada etika tidak mungkin bisa berkembang tanpa diimbangi oleh kesejahteraan yang memadai. Menurut AJI, kesejahteraan jurnalis yang memadai ikut mempengaruhi jurnalis untuk bekerja profesional, patuh pada etika dan bersikap independen.

Program kerja yang dijalankan AJI untuk membangun komitmen tersebut, antara lain dengan sosialisasi nilai-nilai ideal jurnalisme dan kesadaran atas hak-hak ekonomi pekerja pers. Sosialisasi dilakukan antara lain dengan pelatihan jurnalistik, diskusi, seminar serta penerbitan hasil-hasil pengkajian dan penelitian

soal pers. Sedang program pembelaan terhadap hak-hak pekerja pers, antara lain dilakukan lewat advokasi, bantuan hukum dan bantuan kemanusiaan untuk mereka yang mengalami represi, baik oleh perusahaan pers, institusi negara, maupun oleh kelompok-kelompok masyarakat.

Berdasarkan keputusan Kongres AJI ke-V di Bogor, 17-20 Oktober 2003, ditetapkan bahwa bentuk organisasi AJI adalah perkumpulan. Namun, AJI Kota (seperti AJI Medan, AJI Surabaya, AJI Makassar, dan lainnya) mempunyai otonomi untuk mengatur rumah tangganya sendiri, kecuali dalam hal (1) berhubungan dengan IFJ, organisasi internasional tempat AJI berafiliasi dan pihak-pihak internasional lainnya; serta (2) mengangkat dan memberhentikan anggota.

Kekuasaan tertinggi AJI ada di tangan Kongres yang digelar setiap tiga tahun sekali. AJI dijalankan oleh pengurus harian dibantu Koordinator Wilayah dan Biro-biro khusus. Dalam menjalankan kepengurusan organisasi, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AJI dibantu oleh beberapa koordinator divisi beserta anggotanya, yang didukung pula oleh manajer kantor serta staf pendukung.

Untuk mengontrol penggunaan dana organisasi dibentuklah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang anggotanya dipilih oleh Kongres. Majelis Kode Etik juga dipilih melalui Kongres. Tugas lembaga ini adalah memberi saran dan rekomendasi kepada pengurus harian atas masalah-masalah pelanggaran kode etik organisasi yang dilakukan oleh pengurus maupun anggota.

Kepengurusan sehari-hari AJI Kota dilakukan oleh Pengurus Harian AJI Kota, yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa koordinator

divisi. Mereka dipilih lewat Konferensi AJI Kota yang dilangsungkan setiap dua tahun sekali⁴⁵

AJI membuka diri bagi setiap jurnalis Indonesia yang secara sukarela berminat menjadi anggota. Syarat terpenting adalah menyatakan bersedia menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Kode Etik AJI. Bagi yang berminat, bisa menghubungi sekretariat AJI Indonesia, AJI kota atau AJI perwakilan luar negeri.

B. *Fenomena kekerasan jurnalis Makassar.*

Fenomena kekerasan yang terjadi di Makassar dari tahun ke tahun masih terus saja berulang, kekerasan yang dialami oleh jurnalis beragam bentuknya, namun dalam catatan AJI Makassar yang paling sering melakukan kekerasan adalah pihak aparat, dalam hal ini adalah polisi, AJI pernah bersepakat bahwa Polisi adalah musuh bersama jurnalis pada tahun 2015.

Berikut ini adalah rentetan fenomena kekerasan yang dialami oleh jurnalis Makassar yang berhasil dihimpun oleh penulis berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan, kekerasan yang terjadi dalam kurun waktu 2011 hingga 2015.

di tahun 2015 sebanyak 15 kasus ditangani oleh AJI. Kalau untuk kasus kekerasan sendiri kami mengawal sekitar 15 kasus, dan kasus sementara kami alihkan di tahun 2015 ini ada 3 kasus tapi bentuknya informatif saja belum dalam penanganannya karena orang yang melapor secara langsung ke AJI memberanikan diri untuk melapor, misalnya kemarin ada salasatu jurnalis yang katanya di cekik di rumah jabatan walikota, kami coba dampingi

⁴⁵ <http://Tempo.co/2001/1/sejarah> AJI. html?m= 1 (diakses pada pukul 1:43 wita hari Rabu, 23 november 2016)

dengan konfirmasi kepada si korban namun entah dia takut atau bagaimana usaha kami tidak di respon baik oleh si korban.⁴⁶

Yang di beberkan informan di atas merupakan hal yang dialami oleh AJI Makassar dalam upaya pendampingan, bahwa tidak semua itikat baik AJI di respon dengan baik pula.

kekerasan yang terjadi di Makassar kebanyakan dilakukan oleh orang yang tau aturan dan yang punya jabatan, seperti aparat kepolisian, Ridwan Marzuki mengatakan, kebanyakan dari pelaku tidak mau diliput.

Kekerasan sering menimpa jurnalis karena banyak faktor. Biasanya terjadi ketika narasumber atau orang yang diberitakan, tak menerima pemberitaan yang dibuat jurnalis yang bersangkutan. Biasa juga dilakukan oleh keluarga, simpatisan, teman, atau bahkan orang bayaran. Namun khusus untuk kasus yang diadvokasi AJI Makassar, kebanyakan melibatkan aparat negara polisi, tentara, pemerintah daerah termasuk PNS satpol, dll. Tak terima diberitakan, jurnalis yang jadi sasaran. Seperti yang terjadi pada November 2014.⁴⁷

Menurut informan di atas yang paling banyak melakukan kekerasan terhadap jurnalis merupakan orang-orang menduduki jabatan di pemerintahan salah satunya yang paling sering adalah aparat kepolisian.

menurut Muhammad Idris kasus yang paling besar pembakaran palopo pos pada tahun 2012.

Ada beberapa tapi yang paling besar itu adalah kasus kekerasan yang terjadi di palopo dan bentrok polisi dan mahasiswa di Universitas Negeri Makassar 2014 lalu, dan salasatu pelaku disidang dan dipenjarakan, selanjutnya kasus pembakaran kantor palopo pos pada tahun 2012, itu juga salasatu kasus yang di kawal oleh AJI Makassar.⁴⁸

Penjelasan informan di atas merupakan kasus-kasus yang besar didamping AJI Makassar.

⁴⁶ Agam Qodriansyah, Ketua AJI Makassar, *Wawancara*, Makassar, 24 Juli 2016

⁴⁷ Ridwan Marzuki Anggota AJI Makassar, *Wawancara*, Makassar 26 Juli 2016

⁴⁸ Muhammad Idris Koordinator Divisi Advokasi AJI Makassar, *wawancara*, Makassar 21 Juli 2016

Berbeda dengan penjelasan informan berikut, Rahmat Hardiansyah menjelaskan dirinya tidak tau pasti berapa kasus yang ditangani oleh AJI karena dirinya baru menjabat sekretaris beberapa bulan lalu, tapi yang baru itu kasus bentrok antara mahasiswa dan aparat kepolisian di depan UNM yang menyebabkan beberapa wartawan jadi korban keganasan aparat kepolisian.

saya tidak tau pasti berapa banyaknya, tapi yang jelasnya sudah banyak sekali kasus yang di akawal oleh AJI Makassar, yang terakhir itu kasus yang menimpa jurnalis pada saat bentrok mahasiswa sama aparat kepolisian di Kampus UNM 2014, yang jadi korban jurnalis Mero TV, Tempo, Selebes Online, dan ada juga beberapa wartawan lain, data lengkapnya selahkan minta sama sekretaris lama.⁴⁹

Informan di atas mengatakan kalau kasus yang ditangani oleh AJI Makassar, tidak ditau berapa banyak tapi kasus yang dikawal sudah banyak.

Berikut adalah data-data kekerasan jurnalis Makassar dari tahun ke tahun yang terjadi di sekitar Makassar yang penulis dapatkan dari mantan sekretaris umum AJI periode 2014-2016. Kasus yang terjadi tahun 2014 Polisi menyerang kampus UNM, 8 wartawan menjadi korban kekerasan oleh pihak kepolisian.

1. Waldy Vincent (jurnalis Metro TV)
2. Iqbal Lubis (wartawan Tempo)
3. Ikrar (wartawan Celebes TV)
4. Rifki (Wartawan Celebes Online)
5. Aco (wartawan TVone)
6. Fadli (wartawan Profesi)
7. Asep (wartawan Rakyat Sulawesi Selatan)
8. Anonim

Sedangkan Kasus kekerasan terhadap jurnalis di tahun 2013 sebanyak Sembilan kasus yang di data oleh AJI Makassar berikut datanya:

1. Jurnalis BI, Wiwik mendapat perkataan kasar dari PT Semen Tonasa

⁴⁹ Rahmat Hardiansyah, Sekretaris AJI Makassar, wawancara, Makassar, 22 Juli 2016

2. Sulfaedar Pay, jurnalis Koran Tempo Makassar mengalami pelecehan dari Kadishub Sulsel, Masykur Sultan
3. Kantor Palopo Pos dibakar
4. Kantor Fajar Biro Palopo dirusak
5. Kantor Sindo Palopo dirusak
6. Kameramen Fajar TV, Harun terkena busur di Jalan Veteran
7. Jurnalis Rakyat Sulsel, Subhan, dilecehkan oleh Kabag Hukum Pangkep, Irdas.
8. M Ardiansyah (Endhy), ditikam oleh geng motor
9. Harun juga jadi korban namun sempat lolos

Tahun 2012, sebanyak sembilan kasus kekerasan yang dialami oleh jurnalis

Makassar :

1. Tribun Timur Akhwan Ali dan Bupati Pinrang, Aslam Patonangi
2. Kompas TV dan Pare Pos, Chermanto dan Ade Cahyadi dengan PT Semen Tonasa Pangkep,
3. Kontributor Cakrawala Selayar Daeng Siujung disekap oleh Satpol PP saat memberitakan pengacara Bupati Selayar Syahrir Wahab yang dibayar menggunakan APBD.
4. Kameramen TVRI, Kelto, dianiaya oleh oknum patmor Polrestabes Makassar
5. Kameramen Cakrawala TV dianiaya oknum polantas Gowa
6. Ajudan sekwan DPRD Sulsel mengancam wartawan saat akan mengonfirmasi keberadaan sekwan
7. SYL marahi wartawan saat berada di Bone
8. Ketua DPRD Sulsel bentak wartawan
9. penyerangan Kantor Fajar Biro Sinjai

Didua ribu sebelas, sebanyak sepuluh kasus yang terjadi, dan dikawal oleh AJI Makassar.

1. Edi Sumardi Jurnalis Tribun Timur dipukuli dan dikeroyok di Gowa
2. Bupati Bulukumba Zainuddin Hasan menyebut media tidak bisa dipercaya
3. Usman jurnalis Makassar TV vs kantor PT Angkasa Pura Makassar saat meliput demo
4. AKP Syamsiah kasar terhadap jurnalis yang meliput serah terima jabatan di Polda
5. Anggota DPRD Kabupaten Maros Muhammad Amri Yusuf dianggap menghina profesi jurnalis di Maros dengan menuliskan komentarnya di media sosial
6. urnalis SCTV, Zainuddin, ditikam oleh Akbar, seorang pengedar narkoba

7. Kameramen SCTV, M Rais terluka saat meliput penangkapan pelaku pencuri laptop di Warkop Manuruki
8. Suparman jurnalis Radar Bulukumba dianiayai oleh pelajar saat meliput tawuran
9. Jurnalis Metro TV, Tamsir, terkena lemparan batu di mulut (12 jahitan)
10. Sepeda motor jurnalis Celebes TV disandera saat liputan bentrok di Unhas
11. Kapolres Palopo AKBP Fharuddin, melarang jurnalis meliput pertemuan polisi dengan mahasiswa⁵⁰

Data-data di atas merupakan rentetan kasus kekerasan yang dialami oleh jurnalis Makassar mulai dari tahun 2011 hingga tahun 2015, dan semuanya pernah dikawal oleh AJI Makassar, namun dari semua kasus yang terjadi tidak semua berjalan dengan yang sesuai direncanakan, tentunya banyaknya kendala mulai dari jurnalis hingga perusahaan Pers yang ditempati oleh jurnalis kerja. AJI Makassar tidak punya wewenang yang kuat untuk memaksa seorang jurnalis untuk menyelesaikan kasus hingga tuntas, namun AJI Makassar hanya mengupayakan agar kasus-kasus yang terjadi dikalangan jurnalis Makassar bisa diselesaikan sampai tuntas.

C. AJI Makassar dalam Mengawal Kasus Kekerasan Jurnalis Makassar.

AJI melakukan pengawalan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Makassar dan sekitarnya tentunya mereka memperhatikan kaidah dan aturan-aturan yang berlaku khususnya UU Republik Indonesia tahun 1999 No 40 tentang Pers terkandung dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945

⁵⁰ Ridwan Marzuki Anggota AJI Makassar Wawancara, Makassar 26 Juli 2016

Kode etik jurnalistik dan kode perilaku jurnalis, yang kemudian menuntun AJI tetap independen dan objektif dalam melihat sebuah kasus, mana kasus yang layak didampingi atau tidak layak, oleh karena itu AJI selalu berhati-hati dalam bertindak, AJI merupakan satu-satunya organisasi profesi Jurnalis yang senantiasa konsisten dan komitmen dalam memperjuangkan kebebasan pers di Indonesia lebih khususnya kasus-kasus yang terjadi di Makassar dan sekitarnya.

AJI Makassar tidak hanya sekadar organisasi yang selalu berjuang untuk memperjuangkan kebebasan Pers, namun jauh dari itu AJI Makassar mewadahi jurnalis-jurnalis yang berpotensi dan independen dalam dunia jurnalistik, sebagaimana yang dikatakan Qodriansyah Agam Sofyan:

Tentu kehadiran organisasi ini sangat membantu teman-teman jurnalis lain untuk memperjuangkan hak-hak jurnalis khususnya yang ada di kota Makassar dan sekitarnya, dan AJI itu adalah organisasi profesi jurnalis yang menghimpun semua jurnalis yang mempunyai integritas dan independensi dalam melakukan kegiatan jurnalistik, jurnalis yang gabung di AJI adalah orang yang sudah dipilih dan sudah diseleksi, dan organisasi AJI sendiri berpusat di Jakarta, dan memiliki cabang di seluruh kota besar di Indonesia termasuk di kota Makassar, AJI sendiri merupakan salah satu organisasi profesi yang sudah diakui oleh Dewan Pers Indonesia bahkan dunia.⁵¹

Yang dikemukakan oleh Qodriansyah Agam Sofyan di atas bahwa orang-orang AJI merupakan orang terpilih, dan tidak sembarang jurnalis yang akan direkrut.

oleh sekretaris Umum AJI Rahmat Hardiansyah. AJI Makassar memiliki Lima divisi, yang kelima memiliki fungsi masing-masing, yang berkaitan dengan jurnalis dan masyarakat.

Di organisasi AJI sendiri memiliki beberapa divisi didalamnya namun khusus yang menangani soal kekerasan adalah divisi advokasi, nah divisi

⁵¹ Qodriansyah Agam Sofyan, Ketua AJI Makassar, Wawancara, Makassar, 24 Juli 2016

inilah yang khusus menangani jurnalis-jurnalis yang bermasalah, masalah dengan perusahaannya, ancaman hingga kekerasan fisik, tapi bukan berarti divisi yang lain tidak ikut serta dalam bagian ini, pada intinya semua divisi kami memperjuangkan hak-hak jurnalis, dan yang lebih khusus lagi di AJI Makassar itu ada divisi perempuan yang khusus menangani jurnalis-jurnali perempuan.⁵²

Pernyataan-pernyataan informan di atas, dipertegas juga oleh mantan sekretaris umum 2014-2016, Riwan Marzuki, menjelaskan AJI Makassar membentuk divisi khusus untuk menangani jurnalis yang bermasalah dengan hukum, dan mendapat tindak penganiayaan.

AJI Makassar bahkan membentuk satu divisi khusus untuk menangani kekerasan terhadap jurnalis, yaitu Divisi Advokasi dan Hukum. Tugasnya adalah mengawal, memproses, dan mengadvokasi setiap kasus kekerasan yang menjadikan jurnalis sebagai korban. Bukan hanya kekerasan terhadap jurnalis yang diadvokasi, namun juga mereka yang mengalami sengketa dengan perusahaannya. Misalnya ketika gaji mereka tak dibayar atau upah mereka di bawah upah minimum provinsi (UMP).⁵³

Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Makassar dalam mengawal kasus kekerasan jurnalis yang ada di sekitar kota Makassar, Jurnalis ketika mendapat tindak penganiayaan yang dilakukan oleh oknum manapun, jurnalis bisa langsung laporkan, atau bisa saja AJI sendiri yang jemput kasus tersebut

Qodriansyah Agam Sofyan, menjelaskan ketentuan-ketentuannya agar kasus-kasus yang dialami oleh jurnalis supaya cepat ditangani oleh AJI Makassar, berikut jelasnya:

Jurnalis yang kena kekerasan bisa melapor langsung ke AJI, bisa juga datang melapor tertulis, dengan masalah yang dialami oleh si korban, atau bisa saja kami yang jemput bola atau mendatangi si korban dan ketika sudah dihadapan diminta secara tertulis kronologi minimal, bagaimana kejadian yang sebenarnya yang terjadi di lapangan terhadap diri korban, kami tidak serta merta pula terima, kami misalnya berpihak kepada dia, kami juga

⁵² Rahmat Hardiansyah, Sekretaris AJI Makassar, wawancara, Makassar, 22 Juli 2016

⁵³ Ridwan marzuki Anggota AJI Makassar, Wawancara, Makassar 26 Juli 2016

harus cek kebenaran di lapangan apakah si korban dalam melakukan tugas jurnalistiknya sudah memenuhi kode etik jurnalistik dan kode etik perilaku, kalau AJI menangani kasus ya seperti itu.⁵⁴

Informan di atas menjelaskan AJI Makassar tidak akan langsung mengambil sikap untuk melakukan pendampingan kalau terjadi kekerasan, atau ada orang yang melapor, pihak AJI terlebih dahulu mempelajari kasusnya layak atau tidak untuk di dampingi

Hal yang disampaikan informan di atas juga disampaikan oleh sekretaris AJI yang baru-baru terpilih berberapa bulan kemarin, dia menjelaskan AJI sebagai organisasi pers yang notabene sebagai organisasi yang memang memperjuangkan kebebasan pers, akan selalu perjuangkan selama itu kebenaran,

Kami sebagai organisasi profesi yang selalu memperjuangkan kebebasan pers, tentu akan mencari tau bagaimana pemasalahan yang dialami oleh korban, apakah memang masalahnya layak kami dampingi atau tidak, hal yang pertama kami lakukan, kami harus tau bagaian awal mula kejadian, sehingga kami bisa menyimpulkan apakah layak atau tidak untuk kami adfokasi, karena jangan sampai kami langsung ambil sikap, baru si jurnalisnya memang yang salah, selama itu berkaitan dengan kariya jurnalistik tentu kami akan perjuangkan⁵⁵

Yang dikatakan oleh informan di atas merupakan sarat untuk kasus yang layak didampingi kasusnya oleh AJI Makassar.

Qodriansyah Agam Sofyan juga mengatakan kebanyakan pelaku yang melakukan kekerasan terhadap jurnalis, mereka tidak mau diliput, seperti yang terjadi kampus UNM, beriku jelasnya:

Dari delapan jurnalis korban kekerasan yang terjadi di kampus UNM, rata-rata pelakunya adalah polisi. Mereka tak terima diliput saat melakukan penyerangan ke dalam kampus, termasuk melakukan pengrusakan inventaris mahasiswa, Ada juga yang mengalami kekerasan karena pemberitaan yang

⁵⁴ Qodriansyah Agam Sofyan, Ketua AJI Makassar, *Wawamcara*, Makassar, 24 Juli 2016

⁵⁵ Rahmat Hardiansyah, Sekretaris AJI Makassar, *wawamcara*, Makassar, 22 Juli 2016.

tidak memenuhi kaidah, Misalnya tidak menerapkan prinsip cover both side, tidak ada konfirmasi, atau bahkan beritanya tidak akurat (valid).⁵⁶

Kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh mantan sekretaris 2014-2016 dan juga mantan koordinator divisi advokasi 2011-2013, Ridwan Marzuki mengatakan:

sebelum mendampingi, terlebih dahulu pihak AJI mengecek bagaimana kronologis kejadian, sebelum mereka menganbil tindakan yang lebih jauh, yaitu memutuskan untuk mengawal kasus yang sementara di hadapi oleh jurnalis yang bersangkutan.⁵⁷

Dari keterangan informan diatas ketika terjadi kekerasan terhadap jurnalis, AJI Makassar akan membentuk tim yang akan melakukan verifikasi untuk memastikan detail kronolgi kejadian, dan mengecek kevalidan kejadian sebelum dikawal.

Ridwan Marzuki juga menjelaskan tidak semua jurnalis dikawal oleh AJI karena menurutnya ada jug a jurnalis yang melanggar kode etik, dan menurutnya tidak akan didampingi, brikut tuturnya:

Korban dan pelaku, termasuk saksi-saksi akan dimintai keterangan dan mencari alat bukti untuk menentukan apakah kasus kekerasan itu akan diadvokasi resmi atau cukup dipantau. Sekadar catatan, tak semua kasus kekerasan yang menimpa jurnalis, bisa diadvokasi. Jurnalis yang karena melanggar kode etik jurnalistik mendapatkan kekerasan itu tidak diadvokasi, Alasannya AJI hanya mengadvokasi jurnalis "bermoral" yakni yang taat pada kode etik. Jika misalnya mengalami kekerasan karena memeras, maka AJI tegas tak akan mendampingi. Jika kekerasan yang dialami terkait masalah pribadi alias tidak berkaitan dengan profesinya sebagai jurnalis, maka kemungkinan tidak akan diadvokasi. Sebab itu bukan wewenang kami, dan itu adalah bagian aparat, AJI berpendapat, itu tindak pidana murni, bukan pelanggaran UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.⁵⁸

Informan di atas mempertegas tidak semua jurnalis yang kena tindak kekerasan diadvokasi, hanya jurnali-jurnalis yang bermoral saja.

⁵⁶ Qodriansyah Agam Sofyan, Ketua AJI Makassar, Wawancara, Makassar, 24 Juli 2016

⁵⁷ Ridwan Marzuki Anggota AJI Makassar, Wawancara, Makassar 26 Juli 2016

⁵⁸ Ridwan Marzuki Anggota AJI Makassar, Wawancara, Makassar 26 Juli 2016

Apa yang disampaikan oleh informan di atas juga disampaikan oleh Muhamad Idris selaku anggota AJI yang menjabat divisi Advokasi, yang menangani khusus kasus- kasus kekerasan jurnalis. menurutnya akan mengutamakan orang AJI daripada jurnalis lain, jadi tidak semua kasus kekerasan juga yang harus di kawal oleh AJI Makassar. tergantung bagaiman dulu kasusnya, ini di tegaskan oleh Muhammad Idris, berikut jelasnya:

Yang pertama paling kami harus pelajari dulu masalahnya seperti apa, kemudian kita lihat apakah mereka yang bermasalah itu anggota AJI atau bukan, tapi sebenarnya meskipun bukan anggota AJI ketika akita mersa terpanggil dengan apa yang mereka hadapi secara *automatis* AJI ikut campur didalamnya dalam hal ini melakukan pendampingan, tapi kita harus lihat permasalahanya seperti apa, jangan sampai wartawanya sendiri yang bermasalah.⁵⁹

Dalalm semau keterangan informan di atas bahwa AJI tidak langsung mendampingi sebuah kasus sebelum diketahui kronologi kejadian, karena sangat penting untuk kemudian, apakah kasusus tersebut layak atau tidak di teruskan ke proses yang lebih serius (persidangan). Kaulau untuk prosedur pengawalan kekerasan jurnalis AJI Makaassar tidak memiliki aturan baku, seperti yang dibeberkan, Muhammad Idris.

Biasanya mereka datang sendiri, datang langsung ke AJI untuk melaporkan kasusnya kalau ada masalahnya, atau kadang-kadang selama ini bisa juga kami istilahnya kami menjemput bola, jadi ketiak ada masalh kita langsung mendatangi yang bersangkutan untuk dimintai bagaiman letakpermasalahannya, kalaumemang layak kita dampingi, kita dampingi⁶⁰

Ungkapan informan di atas bahwa untuk prosedur tergantung kondisi bisa saja AJI menjemput kasus, atau jurnalis yang langsung datang melapor ke kantor

⁵⁹ Muhamad Idris coordinator Divisi Advocasai AJI Makassar, wawancara, Makassar 21 Juli 2016

⁶⁰ Muhamad Idris coordinator Divisi Advocasai AJI Makassar, wawancara, Makassar 21 Juli 2016

AJI Makassar. Untuk Selanjutnya AJI akan pelajari kasusnya sebelum disimpulkan akan dikawal Hal ini disampaikan juga oleh ketua Umum AJI Makassar, Qodriansyah Agam Sofyan

Jurnalis yang kena kekerasan bisa melapor langsung ke AJI, bisa juga langsung datang melapor tertulis dengan masalah yang dialami oleh si korban, atau bisa saja kami yang jemput bola atau mendatangi si korban dan ketika sudah berhadapan di minta secara tertulis kronologi minimal bagaimana akejadian yang sebenarnya yang terjadi di lapangan terhadap diri korban, kami tidak serta merta pula terima, kami misalnya berpihak kepada dia tapi kami juga harus cek kebenaran di lapangan apakah si korban dalam melakukan tugas jurnalistiknya sudah memenuhi kode etik jurnalistik dan kode etik perilaku, kalau AJI menangani kasus ya seperti itu.⁶¹

Keterangan informan di atas mengatakan kekerasan jurnalis yang terjadi tidak sepenuhnya kesalahan ada kala kesalahan yang dilakukan oleh jurnalis, karena ada juga jurnalis yang kurang memahami tugas jurnalis dalam hal ini adalah kode etik jurnalis sehingga terjadilah penganiayaan. Ridwan Marzuki juga menegaskan tidak semua kasus dikawal, namun sebelum kasus di kawal terlebih dahulu AJI akan membentuk tim.

Ketika terjadi kekerasan terhadap jurnalis, AJI Makassar akan membentuk tim yang akan melakukan verifikasi, memastikan detail kronologi, dan mengecek kevalidan kejadian itu. Korban dan pelaku, termasuk saksi-saksi akan dimintai keterangan, mencari alat bukti untuk menentukan apakah kasus kekerasan itu akan diadvokasi resmi atau cukup dipantau. Sekadar catatan, tak semua kasus kekerasan yang menimpa jurnalis bisa diadvokasi. Jurnalis yang melanggar kode etik jurnalistik mendapatkan kekerasan itu tidak diadvokasi. Alasannya, AJI hanya mengadvokasi jurnalis "bermoral" yakni yang taat pada kode etik. Jika misalnya mengalami kekerasan karena memeras, maka AJI tegas tak akan mendampingi. Jika kekerasan yang dialami terkait masalah pribadi alias tidak berkaitan dengan profesinya sebagai jurnalis, maka kemungkinan tidak akan diadvokasi, Sebab AJI berpendapat itu tindak pidana murni, bukan pelanggaran UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.⁶²

⁶¹ Qodriansyah Agam Sofyan, Ketua AJI, *Wawancara*, Makassar, 24 Juli 2016

⁶² Ridwan Marzuki anggota AJI Seligus mantan sekretaris periode 2014-2016, *Wawancara*, Makassar 26 Juli 2016

Yang disampaikan informan di atas merupakan prosedur dan ketentuan yang diberlakukan oleh AJI Makassar dalam mengawal kasus yang dialami jurnalis Makassar. dan pihak AJI makassar menegaskan tidak akan megadvokasi orang yang yang salah. (Melanggar hukum).

Ridwan Marzuki menegaskan lebih lanjut bahwa AJI Makassar hanya akan mengawal orang yang mau saja, karena ada juga yang tidak mau dikawal kasusnya, untuk kekerasan yang langsung diketahui oleh AJI, maka akan langsung diadvokasi ketika memenuhi syarat pengadvocasian.

Tim akan langsung dibentuk untuk melakukan pencarian data awal sebelum menggalang dukungan, termasuk mengajak LBH Pers untuk mengawal kasus hukumnya. Sementara untuk kasus yang tak diketahui, biasanya baru diadvokasi ketika korbannya melapor. Mereka membuat keterangan, kronologis, dan awal masalahnya. Namun perlu diketahui, AJI Makassar hanya mengadvokasi mereka yang mau. Sebab, ada juga kasus kekerasan jurnalis terjadi, namun korban tak mau diadvokasi dengan alasan tidak ingin berproses hukum. Biasanya karena alasan tak ingin menghabiskan waktu bolak-balik kantor polisi atau kejaksaan, jurnalis korban tak ingin diadvokasi. Sekadar diketahui, tidak semua kasus kekerasan terhadap jurnalis diadvokasi hingga proses hukum. Ada yang hanya dikawal hingga tingkat mediasi, terutama ketika korban dan perusahaan media tempatnya bekerja cabut laporan atau tak ingin kasusnya dilanjutkan.⁶³

Dalam pengawalan kasus kekerasan AJI tidak selalu mulus dalam perjalanannya, tapi ada juga halangan seperti, tiba-tiba diambil alih oleh kantor tempat kerja jurnalis yang dapat kekerasan salah satu contoh kasusnya adalah kejadian di kampus UNM Thun 2014 silam berikut penjelasan Qodriansyah Agam Sofyan

Kasus penganiayaan sejumlah Jurnalis di kampus UNM pada bulan nopember 2014' adalah contoh konkrit pengawalan kasus kekerasan jurnalis yang dikawal ketat sejumlah lembaga Pers, seperti AJI, IJTI, PJI Sulsel, tiba-tiba berhenti di tengah jalan, dan ternyata sudah melakukan

⁶³ Ridwan Marzuki mantan sekretaris 2014-2016, *Wawancara*, Makassar 26 Juli 2016

kesepakatan di luar, dengan menghindari pemeriksaan lanjutan saat kami tanya alasannya terganggu pekerjaan dan berbagai alasan lain.⁶⁴

Yang dijelaskan oleh informan di atas. Merupakan salah satu contoh kasus yang sementara dikawal oleh AJI Makassar dan beberapa lembaga provesi lainnya dan tiba-tiba mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas.

Selanjutnya dengan kasus yang sama juga, Ridwaan M arzuki juga menegaskan

Kasus UNM itu salah satu korbanya namanya Asep, memilih tidk mau lanjut, alasannya capek, bolak-balik kantor polisi. Dia merasa jenuh, apalagi perusahaannya tidak mendampingi setiap dimintai keterangan oleh penyidik hanya koalisi jurnalis Makassar dan AJI yang mendampingi.⁶⁵

Penjelasan informan di atas merupakan bagian kecil kasus yang sementara dikawal dan tiaba-tiba menarik did an tidak maudilanjutkan

Sedangkan untuk upaya meminimalisir kekerasan AJI Makassar, melakukan upaya pmbobotan sumberdaya manusia, yakni dengan penajaman pengetahuan tentang UU Pers dan kode etik jurnalistik, seperti yang disampaikan Qodriansyah Agam Sofyan.

Ditahun kepengurusan baru ini kami burupaya untuk meningkatkan sumberdaya rekan-rekan jurnalsidi makassar, nah peningkatan itu penajaman kembali soal kode etik jurnalis, kode perilaku dan UU pers itu sendiri, kemungkinan besar para jurnalis ini lalai dalam mengaplikasikanaturan yang ada dalam dirinya, tentang hukum yang berlaku dalam duni pers, itu yang ingin kita tingkatkan, dan sumberdaya itu turunannya kan banyak, misalnya berupa program-program worshop maupun melalui pelatihan-pelatihan, atau kita menginvestigasi setiap individu jurnalis dalam hal pemahaman dia tentang atauran/hukum pers dan kode etik, investigasi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh si jurnalis memahami aturan didalamnya, salasatunya dengan uji kopetensi

⁶⁴ Qodriansyah Agam Sofyan, Ketua AJI, *Wawamcara*, Makassar, 7 Desember, 2016

⁶⁵ Ridwan Marzuki Anggota AJI Makassar, *Wawancara*, Makassar, 7 Desember 2016

yang dilakukan oleh Dewan Pers dan juga kita melakukan kampanye-kampanye, misalnya dia terganggu tugas jurnalisnya akibat tidak sejahtera, bahwa kesejahteraan jurnalis minimal di tingkatkanlah pendapatannya minimal upah minimum regional atau upah minimal kota.⁶⁶

Yang dipaparkan oleh informan di atas adalah bagian dari upaya yang dilakukan AJI Makassar untuk mengurangi kekerasan terhadap jurnalis di sekitar kota Makassar. Ridwan Marzuki juga menjelaskan salah satu cara untuk meminimalisir kekerasan yaitu dengan menemui instansi, seperti polisi untuk mensosialisasikan UU Pers yang berkaitan dengan kerja jurnalis, disamping menemui instansi, AJI mengadakan kajian-kajian untuk menguatkan kompetensi anggota.

AJI intensif menemui setiap terjadi pergantian pimpinan kepolisian di Sulsel. Ini untuk membangun kesepahaman mengenai tugas dan peran jurnalis dalam hal mencari dan mengumpulkan informasi. Setiap kekerasan akan menjadi catatan tersendiri bagi AJI dan akan selalu diungkit ketika terjadi pergantian kapolda. Disamping itu, AJI secara intensif juga meningkatkan pelatihan kepada para anggota, termasuk jurnalis non-anggota. Tujuannya agar mereka bisa menjalankan profesi jurnalistiknya dengan profesional. Jurnalis profesional lebih besar peluangnya terhindar dari kekerasan ketimbang yang abai.⁶⁷

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh AJI Makassar tidak hanya melakukan pelatihan, tetapi juga berusaha melakukan sosialisasi UU Pers dan juga pendekatan-pendekatan persuasif ke instansi-instansi pemerintahan, dan membuat pelatihan supaya jurnalis profesional, jurnalis yang profesional besar kemungkinan akan terhindar dari masalah. Selain mengawal kasus-kasus kekerasan, AJI punya program-program yang tentu untuk menambah wawasan dan

⁶⁶ Qodriansyah Agam Sofyan, Ketua AJI Makassar, Wawancara, Makassar, 24 Juli 2016

⁶⁷ Ridwan Marzuki mantan sekretaris 2014-2016, Wawancara, Makassar 26 Juli 2016

pengetahuan kejournalistikan seperti yang di katakana Qodriansyah Agam Sofyan berikut.

“AJI Makassar selain mengawal kasus-kasus, AJI mengadakan pelatihan jurnalistik, misalnya kepada lembaga pers mahasiswa, sosialisasi undang-undang pers di setiap instansi pemerintahan”.⁶⁸

Jadi AJI Makassar tidak hanya fokus pada urusan kekerasan pers dan jurnalis namun juga punya program-program lain, seperti penjelasan informan di atas. Rahmat Hardiansyah juga mengatakan, AJI makassar aktif dalam mengkampanyekan kebebasan ekspresi dan hak mutlak setiap warga Negara untuk mendapatkan informasi yang benar.

Mengkampanyekan kebebasan berekspresi, memberikan kesadaran kepada orang-orang, bahwa kebebasan ber ekspresi itu adalah hak semua masyarakat, AJI memang kosentrasinya bagaimana pers atau media bisa dengan bebas mengespresikan diri, jadi itu pergerakan utama kita di AJI dan ini merupakan program wajib.⁶⁹

Yang disampaikan oleh informan di atas merupakan bagian dari agenda penting yang di lakukan AJI Makassar, dan menurutnya wajib dilakukan.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Muhammad Idris. AJI Makassar melakukan perekrutan anggota perluasan kerjasama, pengembangan SDM, ini merupakan bagian dari upaya AJI sedekat mungkin dengan instansi, dalam upaya memerdekakan pers Indonesia khususnya sulawesi selatan.

“Merekrut beberapa anggota memperluas jaringan terutama di kalangan jurnalis melakukan kerja sama dengan organisasi lain, dan memberikan pelatihan-pelatihan, jadi kami ada pengembangan SDM di dalam dan di luar”⁷⁰

AJI Makassar bukan sekadar mengawal kasus-kasus kekerasan dan persoalan jurnalis, tapi AJI makassar juga mengantisipasi kejadian yang mungkin saja

⁶⁸ Qodriansyah Agam Sofyan, Ketua AJI, *Wawancara*, Makassar, 24 Juli 2016

⁶⁹ Rahmat Hardiansyah, Sekretaris AJI, *wawancara*, Makassar, 22 Juli 2016

⁷⁰ Muhamad Idris coordinator Divisi Adfokasai AJI, *wawancara*, Makassar 21 Juli 2016

berulang, seperti yang paparkan, Qodriansyah Agam Sofyan, dengan cara sosialisasi UU Pers dan atura-aturan tentang kerja jurnalis.

Tentu kami melakukan upaya untuk menghindari kejadian yang berulang, melalui sosialisasi UU no 40 tahun 1999 dan pasal-pasal nya, dan kami punya kode etik dan perilaku jurnalis, dan ini kami ingin sampaikan kepada seluruh stekholder baik di pemerintahan, Polri, TNI dan sebagainya karena ini penting, kemudian di publikasikan, karena sering kali pelaku kekerasan terhadap jurnalis adalah orang-orang yang justru tempat kami mengambil atau menggali berita atau isu-isu penting yang harus ditau oleh publik.⁷¹

Dari keterangan informan di atas tersebut merupakan langkah yang kemudian dilakukan oleh AJI untuk meminimalisir kejadian yang berulang terhadap jurnalis. Ridwan Marzuki juga menegaskan kembali bahwa AJI Makassar melakukan sosialisasi ke individu jurnalis dan juga menggunakan media sebagai sosialisasi hak-hak jurnalis, dan penguatan integritas terhadap wartawan itu sendiri, karena masih ada sebagian wartawan yang belum sepenuhnya paham masalah aturan pada saat turun meliput di lapangan.

Kita melakukan sosialisasi ke individu-individu jurnalis, atau melakukan Sosialisasi ke media-media terutama yang ada di Makassar, dan kami coba akan coba tanam kembali kode etik dan aturan-aturan yang berkaitan dengan profesi jurnalis itu sendiri, karena masih ada sedikit banyak jurnalis yang belum paham betul dengan kerja-kerjanya sehingga mereka kerap kali mendapatkan kekerasan.⁷²

Sebagaimana yang di jelaskan informan di atas bahwa AJI Makassar dari sekian banyak jurnalis masih ada sedikit banyak yang belum paham betul aturan yang harus di pegang oleh seorang jurnalis, sehingga terhindar dari kekerasan. Yang paling banyak melakukan kekerasan terhadap jurnalis di dominasi oleh aparat

⁷¹ Qodriansyah Agam Sofyan, Ketua AJI, *Wawancara*, Makassar, 24 Juli 2016

⁷² Ridwan Marzuki mantan sekretaris 2014-2016, *Wawancara*, Makassar 26 Juli 2016

kepolisian, TNI, dan anggota DPR, seperti yang disampaikan oleh, Muhammad Idris.

Ya mereka yang melakukan kekerasan bisa aparat kepolisian TNI, DPR dan instansi pemerintah bahkan sipil sekalipun melakukan kekerasan terhadap jurnalis, jadi pelaku-pelaku kekerasan ini bervariasi bukan hanya satu dua instansi tapi semua berpotensi bisa melakukan kekerasan terhadap profesi ini, walaupun tahun lalu AJI sempat mengumumkan tahun 2015 itu, polisi menjadi musuh bersama AJI.⁷³

Yang disampaikan informan di atas selain yang disebutkan di atas, kalangan lain juga berpotensi melakukan pelanggaran kepada seorang jurnalis, dan motif pelaku yang melakukan kekerasan beragam macam-macam

Rahmat Hardiansyah juga menambahkan, motif berbeda-beda berikut penjealasannya:

“Kalau motifnya berbeda-beda banyak macam tergantung kondisi yang terjadi di lapangan tapi kebanyakan mereka tidak mau namanya tercemar itu alasan yang paling banyak”.⁷⁴

Hal yang disampaikan oleh informan di atas juga di paparkan oleh, Qodriansyah Agam Sofyan, bahwa motifnya tergantung di lapangan tapi yang jelasnya mereka tidak suka dengan kerja jurnalis

“Motif kekerasan jurnalis itu bermacam-macam, tapi yang jelas, pelaku kekerasan merupakan orang-orang yang punya jabatan, yang kemudian tidak di oleh public, tentang kejahatan yang mereka lakukan.”⁷⁵

AJI Makassar tidak hanya mendampingi anggotanya saja, tapi jurnalis manapun akan difokuskan, selama itu sesuai dengan prosedur, namun AJI memprioritaskan anggota sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Qodriansyah Agam Sofyan berikut.

⁷³ Muhamad Idris coordinator Divisi Adfokasai AJI, wawancara, Makassar 21 Juli 2016

⁷⁴ Rahmat Hardiansyah, Sekretaris AJI, wawancara, Makassar, 22 Juli 2016

⁷⁵ Qodriansyah Agam Sofyan, Ketua AJI, Wawancara, Makassar, 24 Juli 2016

Intigasinya jadi begini AJI hanya memprioritaskan anggota AJI, namun ketika kami dibutuhkan, kami juga tidak tinggal diam tetap kami akan mendampingi, advokasi itu untuk siapa, tentu adalah jurnalis-jurnalis yang merupakan anggota AJI, ini hanya advokasinya tapi untuk hukumnya atau *legal standingnya* dalam bahasa hukum, AJI bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum pers, dan LBH Pers ini sendiri beralamat di jalan pelita raya no 3, sebagai pendampingan hukum, apakah ini kasus ini layak dibawa karena hukum atau tidak, maka LBH pers mendampingi untuk atau non litigasinya.⁷⁶

Penjelasan informan di atas juga diperjelas oleh mantan sekretaris priode sebelumnya Ridwan Marzuki yang menegaskan bahwa AJI akan prioritaskan anggotanya sendiri, berikut penjelasannya.

AJI memprioritaskan mengadvokasi anggota sendiri. Namun juga tetap membuka ruang advokasi non-anggota. Kasus UNM 2014, hanya satu anggota AJI. Namun semuanya diadvokasi. Empat membuat Laporan Polisi (Iqbal, Ikrar, Asep, dan Waldy).⁷⁷

Namun lain halnya dengan yang disampaikan oleh Muhammad Idris, yang mengatakan semua jurnalis yang kena kekerasan kami akan didampingi dengan syarat, kasus harus memenuhi syarat untuk didampingi, berikut penjelasannya:

“Jadi semua kasus kekerasan kami akan didampingi, terkecuali kasus tertentu yang menurut kami tidak layak didampingi, tetapi ada juga kasus yang memang perlu didampingi tapi dari jurnalisnya sendiri tidak mau melanjutkan, bisa juga kantornya yang melarang untuk dilanjutkan.”⁷⁸

Selain penyampaian informan di atas yang mengatakan semua kekerasan akan didampingi, namun untuk terhindar dari kasus-kasus tindakan penganiayaan/kekerasan, AJI punya beberapa saran yang mungkin bisa diterapkan oleh jurnalis di lapangan, Qodriansyah Agam Sofyan, mengatakan akan berupaya peningkatan penajaman kode etik jurnalis dalam Tiga Tahun kedepan, berikut jelasnya:

⁷⁶ Qodriansyah Agam Sofyan, Ketua AJI, *Wawancara*, Makassar, 24 Juli 2016

⁷⁷ Ridwan Marzuki mantan sekretaris 2014-2016, *Wawancara*, Makassar 26 Juli 2016

⁷⁸ Muhamad Idris coordinator Divisi Advokasi AJI, *wawancara*, Makassar 21 Juli 2016

Dalam 3 tahun kedepan akan berupaya untuk meningkatkan sumberdaya teman jurnalis di makassar, peningkatan kualitas seperti penajaman kembali kode etik jurnalistiik, kode perilaku dan uu pers itu sendiri, kemungkinan para jurnalis ini masih banyak yang belum terlalu paham aturan, ada juga jurnalis yang hanya mengandalkan kartu pers lalu mereka semaunya keluar masuk tanpa pemberitahuan, itu tidak boleh, jurnalis kan ada aturan juga yang tidak boleh di langgar,⁷⁹

Uraian informan di atas merupakan rencana sekaligus cara menghindari terjadinya kemungkina penganiayaan terhadap jurnalis di lapangan. Kemudian diperjelas lebih jauh oleh Ridwan Marzuki, untuk bagaiman menghindari kemungkinan yang membahayakan diri jurnalis di lapangan, penjelasan sebagai berikut:

Beragam cara untuk menghindari kekerasan. Ini sangat terkait dengan kemampuan beradaptasi di lapangan Juga terkait dengan kemampuan individu untuk membaca segala situasi di sekitarnya. Namun yang paling pokok, jurnalis mesti profesional (termasuk menjalankan prinsip-prinsip kode etik) dan UU Pers.⁸⁰

Salah satu jurus selat yang yang ditekankan oleh informan di atas jurnalis harus jeli melihat situasi dan kondisi lapangan, yang berpotensi membahayakan diri.

Lain halnya dengan Muhammad Idris yang menekankan bahwa untuk terhindar dari tindak kekerasan harus kembali ke diri jurnalis masing-masing, sejauh mana jurnalis memahami aturan-atura yang ada dan jeli melihat situasi.

Yang paling pertama kembali ke personal jurnalisnya apakah mereka sadar yang dilakukannya, dan sadar dengan etika kerja mereka paham undang-undang Pers dan menghargai etika dan budaya masyarakat setempat, misalkan kalau masuk daerah orang.⁸¹

⁷⁹ Qodriansyah Agam Sofyan, Ketua AJI, *Wawamcara*, Makassar, 24 Juli 2016

⁸⁰ Ridwan Marzuki mantan sekretaris 2014-2016, *Wawancara*, Makassar 26 Juli 2016

⁸¹ Muhamad Idris coordinator Divisi Adfokasai AJI, *wawancara*, Makassar 21 Juli 2016

Semua uraian keterangan informan diatas merupakan hal-hal yang harus dimiliki oleh setiap jurnalis yang hendak melakukan aktifitas peliputan, jadi dimanapun mereka berada, guna untuk menghindari dan meminimalisir kejadian yang tidak di inginkan.

Di dalam melakukan pengawalan kasus-kasus kekerasan AJI Makassar tidak sendiri, AJI melakukan kerja sama dengan lembaga bantuan hukum Pers, seperti yang di jelaskan oleh Qodriansyah Agam Sofyan sebagai berikut:

“Iya tentu aji mengawal kasus tidak sendirian, dalam sekarang ini kami bekerja sama dengan Tiga lembaga profesi jurnalis, persatuan wartawan indonesia (PWI) dan yang ke Dua ikatan jurnalis televisi idonesia (IITI) dan kedepan dalam tiga organisasi ini kamiakan bentuk tim khusus untuk mendampingi kasus yang menghalangi kerja para jurnalis.”⁸²

Seperti yang dikatakan informan di atas AJI tidak sendiri dalam melakukan adfokasi kasus-kasus yang terjadi,AJI sudah merencanakan akan membentuk tim khusus dari tiga organisasi di atas. Ridwan Marzuki juga menambahkan untuk memperkuat adfokasi AJI menggalang dukungan organisasi profesi junalis lainnya, berikut penjelasanya:

“AJI biasanya menggalang dukungan bersama organisasi profesi pers lainnya untuk menguatkan advokasi. Biasanya delegasi AJI yang akan menjadi lokomotif aliansi advokasi lintas organisasi itu”.⁸³

Di jelaskan lebih jauh juga oleh Muhammad Idris bahwa pihak AJI makassar tidak sendiri untuk pengawalan tindak kekerasan ditingkat jurnalis, aji sendiri melakuan kerja sama dengan lembaga lain seperti, LBH Pers dan juga organisasi provesi pers lainnya, berikut penjelasan Muhammad Idris.

⁸² Qodriansyah Agam Sofyan, Ketua AJI, *Wawamcara*, Makassar, 24 Juli 2016

⁸³ Ridwan Marzuki mantan sekretaris 2014-2016, *Wawancara*, Makassar 26 Juli 2016

Kalau kerja sama sudah tentu kami melakukan kerja sama dengan lembaga bantuan hukum pers 9(LBH PERS) jadi ada memang lembaga khusus untuk di kalangan jurnalis dan kalau memungkinkan kerja sama dengan organisasi profesi pers bisa juga, tapi tergantung bagaimana kasusnya.⁸⁴

Keterangan informan diatas merupakan langkah-langkah kerjasama yang dilakukan oleh AJI Makassar, dalam upaya untuk mendampingi dan mengurangi kasus kekerasan yang terjerat jurnalis makassar, selain upaya peningkatan kapasitas jurnalis melalui pendalaman UU Pers dan kode etik jurnalistik.

AJI makassar dalam melakukan pengawalan tindak kekerasan jurnalis juga memiliki hambatan dan rintangan, AJI sendiri memiliki kewajiban lain selain mendampingi kasus, seperti yang dikemukakan oleh Ridwan Marzuki.

Sebagai lembaga non-profit, AJI tentu memiliki keterbatasan dalam mengadvokasi. Sebab advokasi cukup menyita waktu dan tenaga. Sementara, semua pengurusnya adalah orang-orang yang terikat dalam pekerjaan atau memiliki kewajiban meliput.⁸⁵

Yang dipaparkan oleh informan di atas merupakan bagian kecil dari hambatan yang dialami oleh AJI Makassar dalam memperjuangkan kebebasan ber ekspresi, lebih jauh juga dijelaskan oleh Qodriansyah Agam Sofyan, berikut, tentang hambatan AJI dalam menghadapi kasus kekerasan jurnalis Makassar.

Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat, misal salasatu contoh saya melaporkan kasus kekerasan ke AJI dan ditengah advokasinya ini, tarikhlah kesimpulan bahwa betul-betul si korban ini di pukul, AJI ambil sikap dengan LBH pers melapor ke polisi, penanganan kasusnya di dampingi terus tiba- tiba di tengah jalan, saya dikasi tahu sama perusahaan dalam hal ini pimpinan, jangan kamu teruskan sudah ada iklan, dia sudah ada kerjasama dengan perusahaan kita, kalau kau teruskan dia akan cabut iklan kita, dan mana kau pilih cabut iklan atau kau akan di pecat, inilah yang sering terjadi, disaat melakukan pendampingan, dan akhirnya berhenti di tengah jalan. Dan tidak adanya sinergi antara organisasi profesi jurnalis dengan perusahaan pers.⁸⁶

⁸⁴ Muhamad Idris coordinator Divisi Advokasi AJI, wawancara, Makassar 21 Juli 2016

⁸⁵ Ridwan Marzuki mantan sekretaris 2014-2016, Wawancara, Makassar 26 Juli 2016

⁸⁶ Qodriansyah Agam Sofyan, Ketua AJI, Wawancara, Makassar, 24 Juli 2016

Hambatan yang dihadapi oleh AJI Makassar, seperti yang dipaparkan informan di atas, merupakan hambatan yang sulit AJI hindari karena kantor jurnalis kerajaan yang intruksi langsung, AJI tidak bisa berbuat banyak. Rahmat Hardiansyah menjelaskan hal yang serupa yang disampaikan oleh informan di atas, berikut jelasnya:

Penghambatnya banyak. Bisa dari perusahaan media sendiri yang cenderung pasif mengadvokasi jurnalisnya yang mengalami kekerasan. Korban yang tak ingin ambil pusing berproses hukum. Bahkan kerap perusahaan medianya yang bernegosiasi dengan pelaku kekerasan sehingga urung lanjut ke proses hukum.⁸⁷

Apa yang disampaikan oleh informan sebelumnya juga dipertegas oleh Muhammad Idris, bahwa untuk memperjuangkan tindak kekerasan jurnalis itu masih banyak sekali hambatan, terutama dari perusahaan pers dan dari jurnalisnya sendiri, berikut pernyataannya:

Biasanya ada dari medianya sendiri yang menghambat proses pendampingan itu misalnya, pimpinannya merasa tidak perlu lagi diteruskan, dan terkadang ada juga lawan dari teman-teman tidak begitu transparan bagaimana kejadian yang sebenarnya, dan bisa juga dari wartawan sendiri yang menarik diri.⁸⁸

Pernyataan informan di atas merupakan faktor yang kemudian sering dihadapi oleh AJI Makassar dalam mengawal kasus-kasus kekerasan jurnalis Makassar. Dalam pengawalan kasus kekerasan jurnalis yang terjadi di Makassar sendiri, AJI mengaku bahwa apa yang dilakukannya saat ini belum maksimal, seperti yang diutarakan oleh Qodriansyah Agam Sofyan, berikut jelasnya:

⁸⁷ Rahmat Hardiansyah, Sekretaris AJI, wawancara, Makassar, 22 Juli 2016

⁸⁸ Muhamad Idris coordinator Divisi Advokasi AJI, wawancara, Makassar 21 Juli 2016

“Kalau makasimal, saya kira belum, kaerena kami masih punya kekurangan, tapi kami selalu mengupayakan yang terbaik untuk dunia jurnalis khususnya di Makassar dan indonesia timur”.⁸⁹

Namun lain halnya yang dikemukakan oleh Muhammad Idris, bahwa AJI menurutnya sudah maksimal dalam mengawal semua kasus yang terjadi, namun kembali ke jurnalisnya, dia serius atau tidak dikawal kasusnya, brikut penjelasan

“Kalau maksimalsi menurut saya sudah selama ini, tapi kami kembalikan ke jurnalisnya karena ada juga kasus yang sementara berjalan tiba-tiba dihentikan secara sepihak, saya kira sudah maksimal apa yang AJI lakukan.”⁹⁰

Menurut informan di atas AJI belum berupaya maksimal dalam mengawal kasusus kekerasan terhadap jurnalis makassar.

Menurut Rahmat Hardiansyah kalau dirinya tidak bisa menjawab soal itu Karena biarkan orang yang menilai sendiri seperti apa yang AJI lakukan untuk jurnalis, tapi kalau dampingi kasus kami siap sampai tuntas, tapi mereka harus konsisten.

Kalau soal maksimal atau tidak itu kan ukurannya, kalau saya pribadi menilai tidak mungkin karena orang akan menilai, maksila gak pengawalanya, tapi kalau soal pendampingan, kami akan mendampingi kasus itu sampai selesai, tapi banyak kasus yang sementara berjalan tapi tiba-tiba berhenti di jalan karena di selesaikan di luar, dan ini AJI tidak pernah dilibatkan, nah ini juga yang bermasalah.⁹¹

Ungkapan informan di atas adalah, bahwa AJI Makassar belum begitu maksimal dalam pengawalan terhadap jurnalis yang kenna tindak kekerasan pada saat melakukan kegiatan jurnalistik di lapangan.

Faktor yang mendorong AJI Makassar sendiri untuk terus-menerus mengawal dan mendampingi kasus-kasus kekerasan tidak lain, ingin

⁸⁹ Qodriansyah Agam Sofyan, Ketua AJI, *Wawancara*, Makassar, 24 Juli 2016

⁹⁰ Muhamad Idris coordinator Divisi Adfokasai AJI, *wawancara*, Makassar 21 Juli 2016

⁹¹ Rahmat Hardiansyah, Sekretaris AJI, *wawancara*, Makassar, 22 Juli 2016

memperjuangkan kebebasan Pers dan kebebasan untuk mendapatkan informasi yang benar seperti yang di amanahkan UU. dijelaskan juga oleh Muhammad Idris berikut.

“Ini sudah tentu menjadi tujuan kami, dan kami akan selalu berjuang untuk kebebasan pers di Indonesia, dan sudah menjadi komitmen kami buatkan hanya AJI Makassar, tetapi juga AJI di seluruh kota, di Indonesia”.⁹²

Penjelasan informan diatas merupakan salah satu alasan yang di pegang teguh AJI, untuk senantiasa untuk selalu siap dalam mengawal, dan menyelesaikan kasusus-kasus kekerasan jurnalis. Ridwan Marzuki juga mengatakan, dalam menciptakan negara yang demokrasi yang sehat, Pers harus bebas, sehingga warga Negara bebas untuk mendapatkan informasi yang bebas”.

AJI memandang bahwa untuk menciptakan demokrasi yang sehat, maka pers pun harus bebas. Ketika pers terbelenggu, maka informasi yang sehat, yang menjadi hak asasi warga negara, akan sulit diberikan. Jurnalis yang tanpa tekanan dan kekerasan, akan mampu mendorong demokrasi lebih baik.⁹³

Semua pernyataan informan di atas merupakan semua upaya yang dilakukan oleh pihak AJI Makassar dalam terus memperjuangkan negara demokrasi dan kebebasan Pers di Indonesia, lebih khusus lagi di Sulawesi Selatan, namun AJI mengakui apa yang dialkukannya saat ini belum maksimal, dan masih banyak sekali kendala yang dihadapi oleh AJI dalam upayanya perjuangannya dalam memperjuangkan kebebasan Pers di Makassar.,

Dalam Al-Qur'an sendiri dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 9, surah ke 9



⁹² Muhamad Idris coordinator Divisi Adfokasai AJI, wawancara, Makassar 21 Juli 2016

⁹³ Ridwan Marzuki mantan sekretaris 2014-2016, Wawancara, Makassar 26 Juli 2016



Terjemahnya:

Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, lalu mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Sesungguhnya Amat buruklah apa yang mereka kerjakan itu.

Aksi kekerasan yang banyak dilakukan oleh banyak orang-orang muslim seharusnya telah disadari sejak awal bahwa apa yang mereka lakukan, sesungguhnya adalah sebuah kesalahan yang fatal karena perbuatan tersebut melanggar norma-norma kpatutan baik dari segi perundang-undangan Negara maupun dalam syariat islam, perbuatan bersifat anarkis dan aksi kekerasan fisik sangatlah dibenci dalam islam sehingga seharusnya dihindari dan di jauhi.⁹⁴

Dalam tafsiran di atas agama islam melarang keras perbuatan yang melukia atau kekerasan itu sendiri, kekerasan sangatlah di benci dan tidak sekali-kali umat islam melakukan perbuatan tercela tersebut.



⁹⁴ <https://googleweblight.com/?lite-url=https://id.m.tafsir.almsbah> Di Akses hari rabu 7 Desember.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian terdahulu maka bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari berbagai pembahasan bab-bab yang terdahulu, yang berkaitan dengan peran AJI Makassar dalam mengawal kasus kekerasan jurnalis Makassar sebagai berikut:

1. Gambaran fenomena kasus kekerasan Jurnalis Makassar, berdasarkan hasil observasi dan data-data yang telah di himpun oleh penulis di lapangan, dalam rentang waktu ke waktu pada tahun 2011 hingga tahun 2015, diketahui ragam kasus yang telah dikawal dan didampingi oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Makassar, kasus kekerasan tersebut juga menggambarkan banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh berbagai oknum, mulai dari aparat kepolisian, TNI, Anggota DPR, PNS, hingga masyarakat biasa, dan dilakukan oleh oknum dengan motif yang berbeda-beda.
2. AJI Makassar dalam mengawal kasus kekerasan Jurnalis Makassar, AJI Makassar dalam mengawal kasus Jurnalis yang kena kekerasan bisa melapor langsung ke AJI, bisa juga datang melapor dengan tertulis (menyurat), dengan masalah yang dialami oleh Jurnalis korban kekerasan, atau bisa saja AJI yang jemput kasus mendatangi korban dan ketika sudah berhadapan korban diminta secara tertulis bagaimana kronologi kejadian, setelah mendapat laporan kemudian AJI membentuk Tim untuk mencari tau penyebab kasus, sebelum diserahkan Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH PERS), kalau kasusnya layak

di damping maka akan diserahkan ke LBH Pers untuk melapor ke polisi dan dilakukan penyelidikan sebelum dilimpahkan ke kejaksaan.

B. Implikasi penelitian

Bedasarkan dari uraian terdahulu maka bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari bab-bab terdahulu yang berkaitan dengan Peran AJI Kota Makassar dalam mengawal kasus kekerasan terhadap jurnalis makassar, dan untuk peneliti selanjutnya

1. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Makassar Selalu mengedepankan Objektivitas dan independensi dalam setiap melakukan pengawalan terhadap jurnalis-jurnalis yang mendapat kasus kekerasan.
2. Bagi peneliti selanjutnya agar mudah dalam mendapatkan data-data penelitian yang dibutuhkan, buatlah suasana komunikasi yang baik dengan jurnalis seperti bertanya tentang apa yang ingin diketahui atau tentang penelitian, dan mulailah beradaptasi dengan situasi dan kondisi di tempat penelitian. Kemudian carilah data-data yang dibutuhkan seperti data-data perusahaan, data informan atau yang lainnya, yang berkaitan dengan penelitian, untuk melengkapi skripsi yang dibuat oleh mahasiswa. Tidak lupa pula untuk berterimakasih dan berpamitan dengan semua pihak di perusahaan yang telah membantu selama penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

AS Hikam, Muhammad, 1991, Negara, Masyarakat, Sipil Dan Gerakan Politik di Indonesia, Jakarta: Prima, no, 3 thn 2001

Akhmad Zaini Akbar, 1995 *Kisah Pers Indonesia 1966-1974*, Yogyakarta

Andi Hamzah, *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di Dalam*

AJI dan Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), 1998, *Pers di Terpa Krisis, Laporan Tahunan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia tahun 1997-1998*, Jakarta

Departemen Penerangan, 1983, *Pers Bebas Bertanggungjawab, Himpunan Pidato/ ceramah Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika Departemen Penerangan – Sukirno*, Jakarta,

KUHP. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Agam Qodriansyah, Ketua AJI, Wawancara, Makassar, 24 Juli 2016

Agus Sudibyo , “cermin retak kemerdekaan pers “[/on-line/http://www.dewan.pers.or.id](http://www.dewan.pers.or.id). di akses/10 oktober 2016/pukul 2:30

Amir Purba . *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Medan: Pustaka Bangsa Press. 2006.

Anton Baker, *Metode Filsafat* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Arifuddin Tike, *Dasar-Dasar Komunikasi : Suatu Studidan Aplikasi* (Cet. 1 Agustus 2009), kota kembang Yogyakarta.

Bill dan Tom Rosenstiel Kovach. *Sembilan Elemen Jurnalisme*. Jakarta: Yayasan Pantau. 2001.

Dedy Mulyana, *Metode penelitian kualitatif* Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2002.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Jakarta Press 2006.

Dewan Pers., (On line), <http://www.DewanPers.org/dprs.php> (11 oktober 2016)

Dhanil Dhakidae *kenangan Inspirasi orde lama dan orde baru*, Bandung : Cakrawala Press 2003.

Dja'far Assegaf. *Jurnalistik Masa Kini*. Jakarta: Ghalia Indonesia 1991.

M. Syafii Anwar, 1995, *Pemikiran dan aksi Islam Indonesia (Kajian Tentang Politik Cenedkiawan Indonesia)*, Jakarta: Paramadina.

Mc Quail, Dennis, 1989, *Teori Komunikasi Massa, Sebuah Pengantar*, Jakarta, Erlangga

Husaini usman dan poernomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Cet. IV; Jakarta; PT. Bumi Aksara, 2011.

Indah Suryawanti. *Jurnalistik Suatu Pengantar Teori dan praltik*

Ingnatius Haryanto, Digitalisasi dan Media Sosial: Berkah Kutukan

Jakarta:Aliansi jurnalis Independen AJI Indonesia, 2012.

Kurniawan Junaedhi. *Ensiklopedia Pers Indonesia*. jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 1991.

Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat. *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2008.

Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. 25; Bandung: RemajaRosdakarya, 2008).

Muhamad Idris koordinator Divisi Adfokasai AJI Makassar, wawancara, Makassar 21 Juli 2016

Nana Syaodih Sukmadinata, *pengembangan kurikulum Teoridan Praktek*(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Penjelasan atas undang-undang Republk Indonesia no 40 thn 1999 tentang Pers , Psa,l 8

Qodriansyah Agam Sofyan, Ketua AJI, Wawamcara, Makassar, 24 Juli 2016

R. Rahmadi, pebandingan system pers Jakarta: gramedia, 1990.

Rachmat Criyanto, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, dengan kata pengantar oleh Burhan Bungin , Edisi 1 (Cet, IV ; Jakarta, kencana, 2009.

Racmadi, perbandingan system pers, (Jakarta gramedia ,1990.

AndiHamzah, *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*.(Jakarta: SinarGrafika, 2014).

Rahmat Hardiansyah, Sekretaris AJI, wawamcara, Makassar, 22 Juli 2016.

Ridwan Marzuki mantan sekretaris 2014-2016, Wawancara, Makassar 26 Juli 2016.

Samsul Wahidin, *Hukum Pers*. (Yogyakarta: PustakaPelajar CelebanTimur 2006.

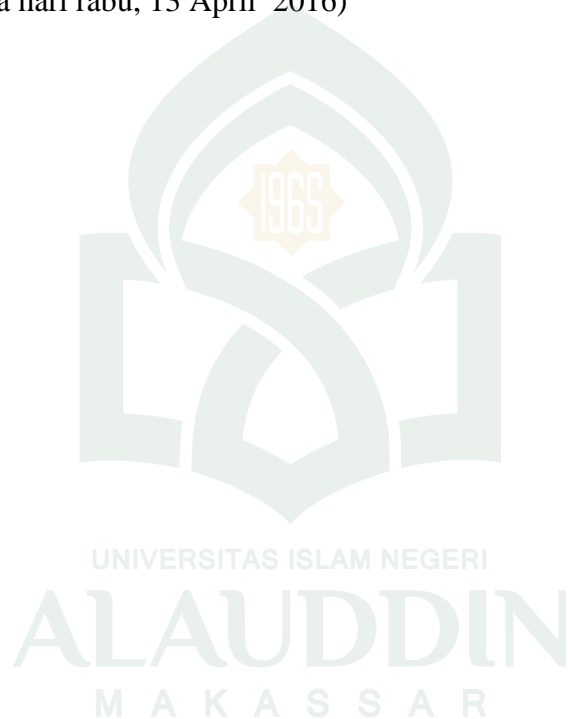
Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: UGM Press, 1999).

[https://googleweblight.com/?lite-url=https://id.m.tafsir almsbah](https://googleweblight.com/?lite-url=https://id.m.tafsir.almsbah) Di Akses
rabu 7 Desember.

<http://Tempo.co/2001/1/sejarah> AJI.html?m= 1 (diakses pada pukul 1:43
wita hari Rabu, 23 nofember 2016)

<http://Tempo.co> Makassar/2014/1/berita-kriminal. html?m=1 (diakses pada
pukul 11:43 wita hari jumat, 5 september 2016)

<http://Tempo.co> Makassar/2015/12/berita-kriminal. html?m=1 (diakses pada
pukul 11:43 wita hari rabu, 13 April 2016)



Lampiran

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana kehadiran AJI sebagai organisasi profesi untuk jurnalis yang ada di Makassar dan sekitarnya?
2. Dalam struktur organisasi, apakah ada divisi yang menangani kasus terhadap jurnalis dan media?
3. Apa yang dilakukan AJI Makassar ketika ada jurnalis yang mengalami kekerasan? bagaimana prosesnya?
3. Bagaimana mekanismenya apakah menunggu laporan atau langsung mengadvokasi?
4. Dari beberapa kasus kekerasan yang dialami jurnalis, apa yang membuat jurnalis kerap kali mengalami kekerasan?
5. Bagaimana peran AJI Makassar secara umum selain menangani kekerasan jurnalis? apakah ada upaya untuk mencegah kejadian berulang?
6. Sudah berapa kasus yang ditangani AJI Makassar?
7. Kasus kekerasan apa saja yang pernah dikawal AJI Makassar?
8. Apakah jurnalis anggota AJI saja yang dikawal kasusnya?
9. Menurut AJI apa yang harus dilakukan jurnalis supaya terhindar dari kekerasan?
10. Bagaimana AJI berhubungan dengan Organisasi jurnalis lain ketika menyelesaikan kasus kekerasan jurnalis?
11. Apakah peran aji sudah maksimal dalam mengawal kasus kekerasan jurnalis di makassar?

12. Apa faktor yang menghambat dalam mengawal kasus kekerasan jurnalis makassar?
13. Apakah AJI sudah betul-betul mengawal kekerasan jurnalis makassar
14. Apa faktor pendorong AJI dalam mengawal kasus kekerasan jurnalis Makassar?
15. Apa kira-kira yang membuat para jurnalis mendapatkan kekerasan?



Dokumentasi



Usai wawancara dengan Muhammad Idris Koordinator Divisi Advokasi AJI
Makassar.



Usai wawancara dengan Ridwan Marzuki Anggota AJI Makassar



Foto bersama Agam Qoriansyah Sofian, ketua AJI Makassar, usai wawancara



Sementara wawancara dengan Rahmat Hardiansyah Sekretaris AJI Makassar



RIWAYAT HIDUP

Junaidin lahir di Parado Rato, 16 Juni 1992 Penulis merupakan anak ke Enam dari delapan bersaudara, anak dari bapak yang bernama H. Abubakar dan ibu yang bernama Asyiah. Penulis merupakan tamatan dari SDN Inpres Parado 2 pada tahun 2004, dan pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 1 Parado dan lulus pada tahun 2009, dan melanjutkan pendidikan di SMKN 1 Bima pada tahun yang sama pula dan lulus pada tahun 2011, dan kemudian melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada jurusan Jurnalistik pada tahun 2011. Selama menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan keorganisasian baik intra maupun ekstra kampus. Adapun organisasi yang pernah digeluti oleh penulis diantaranya Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan pernah menjadi Pimpinan Umum UKM Pers Washilah. Sedangkan di organisasi ekstra kampus, penulis pernah besik training di Himpunan Mahasiswa Islam, dan pernah menjadi ketua umum Organisasi Daerah (ORGANDA). Berkat lindungan Allah SWT, dan Irian Do'a kedua orang tua serta Saudara-saudariku, juga berkat bimbingan para dosen dan *support* dari teman-teman seperjuangan, sehingga dalam mengikuti pendidikan di perguruan tinggi berhasil menyusun skripsi yang berjudul: *“Peran Aliansi Jurnalis Independen (AJI) kota Makassar dalam Mengawal Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis Makassar”*.